

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Umum

Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa pemerintah daerah melaksanakan kewenangannya di bidang urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar dan urusan pilihan. Berdasarkan peraturan diatas, dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) wajib berpedoman terhadap dokumen perencanaan tahunan daerah. Setelah itu rencana pembangunan yang akan dituangkan dalam Perubahan APBD yang telah disepakati dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran, terlebih dahulu dibuat kesepakatan lagi antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Page | 1

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa P-PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) perangkat daerah. Dengan tersusunnya dokumen P-PPAS ini, pelaksanaan program prioritas daerah dan penggunaan anggaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah di Kabupaten Gorontalo Utara dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan.

1.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

1.3. Dasar Hukum

Penyusunan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Gorontalo Utara didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
3. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional ;
4. Undang-Undang No. 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.15.5-3406 Tahun 2024 perubahan kedua atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030 ;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2009-2029; Page | 3
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025; Page | 3
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011-2031 Lembaran Daerah nomor 5;
14. Peraturan Bupati Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan 2025 Nomor 5 Tahun 2025 Tanggal 8 Juli 2025 Berita Daerah Nomor 561.

BAB II**RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH**

Rencana perubahan penerimaan daerah meliputi Pendapatan daerah dan perubahan penerimaan pembiayaan daerah. Rencana perubahan pendapatan dan pembiayaan tersebut disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan daerah serta mempertimbangkan asumsi-asumsi dasar yang mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap pendapatan daerah. Komponen yang terdapat pada Perubahan Pendapatan Daerah berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah Pasal 30, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan yang Sah dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan sampai dengan semester 1 Tahun 2025, realisasi pendapatan berdasarkan pagu terakhir dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Page | 4

**REALISASI PENDAPATAN DAERAH
KAB. GORONTALO UTARA
PER 30 JUNI 2025**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH	712.276.695.756,00	342.921.376.393,82	48,14
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	48.327.913.431,00	8.486.339.837,82	17,55
4.1.01	Pajak Daerah	18.216.566.661,00	3.710.045.751,00	20,36
4.1.02	Retribusi Daerah	1.856.346.770,00	416.649.740,00	22,44
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.000.000.000,00	3.502.436.856,00	87,56
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	24.255.000.000,00	857.207.490,82	3,53
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	654.168.124.384,00	333.526.063.456,00	50,98
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	636.420.946.000,00	319.710.493.357,00	50,23
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	17.747.178.384,00	13.815.570.099,00	77,84
4.2.03	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	9.780.657.941,00	908.973.100,00	9,29

Realisasi pendapatan sampai dengan 30 Juni 2025 mencapai 48% yaitu sebesar Rp342.921.376.393,82 yang terdiri dari capaian Pendapatan Asli Daerah sebesar 17% yaitu Rp8.486.339.837,82, sementara capaian pendapatan transfer sebesar 50% yaitu Rp333.526.063.456,00 yang terdiri dari realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp319.710.493.357,00 dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp13.815.570.099,00 dan Lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp908.973.100,00

Berdasarkan capaian realisasi tersebut di atas dan mempertimbangkan potensi pendapatan yang sudah disesuaikan dengan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat maka Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2025 diperkirakan mengalami perubahan sebesar Rp712.276.695.756,00, yang terdiri dari PAD sebesar Rp48.102.640.190; dan Pendapatan Transfer sebesar Rp654.168.124.384,00. Rencana Perubahan Pendapatan Daerah tersebut sudah memperhitungkan Dana Alokasi Khusus, baik DAK Fisik maupun Non-Fisik, Dana Alokasi Umum *Specific Grant*, .

Sementara itu, untuk Penerimaan Pembiayaan Daerah, berdasarkan Pasal 70 PP Nomor 12 Tahun 2019, pada tahun 2025 yang bersumber dari Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) dan sesuai hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2025 bahwa SiLPA sebesar Rp. 9.890.256.625,60, SiLPA tersebut adalah SiLPA realisasi anggaran Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2024.

2.1. Pendapatan Daerah

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2025 diasumsikan mengalami penyesuaian yang berjumlah Rp. 48.102.640.190 yang berasal dari Pendapatan Pajak Daerah Rp. 18.391.293.419; Hasil Retribusi Daerah Rp. 1.856.346.770,00; Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 2025

Rp 3.600.000.000,00; serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Rp 24.255.000.000,00

2.1.2. Pendapatan Transfer

Bahwa sesuai KMK 29 tahun 2025 tentang penyesuaian Alokasi Transfer ke Daerah dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam APBN dan APBD maka besaran dana Transfer Ke Daerah untuk Kabupaten Gorontalo Utara mengalami penyesuaian yang semula sebesar Rp. 731.469.524.000 menjadi sebesar Rp. 636.420.946.000,

selain itu terdapat pula penyesuaian atas DAK Non Fisik bantuan operasional penyuluh pertanian sebesar Rp. 421.800.000,00, serta bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi sebesar 3.200.000.000, sehingga total Pendapatan Transfer yang semula Rp.746.016.702.384 menjadi 654.168.124.384 atau mengalami pengurangan sebesar (Rp.91.848.578.000,00)

Rincian rencana Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 dapat dijelaskan dalam Tabel berikut :

**PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025**

Norek	Uraian	PREDIKSI PERUBAHAN			
		AWAL	setelah efisiesnsi	Asumsi Perubahan	Lebih/(Kurang)
1	2	3	4	5	6 =(5-3)
4	PENDAPATAN DAERAH	804.125.273.756	712.276.695.756	712.051.422.515	(92.073.851.241)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	48.327.913.431	48.327.913.431	48.102.640.190	(225.273.241)
4.1.1	Pajak Daerah	18.216.566.661	18.216.566.661	18.391.293.420	174.726.759
4.1.2	Retribusi Daerah	1.856.346.770	1.856.346.770	1.856.346.770	-
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.000.000.000	4.000.000.000	3.600.000.000	(400.000.000)
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	24.255.000.000	24.255.000.000	24.255.000.000	-
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	746.016.702.384	654.168.124.384	654.168.124.384	(91.848.578.000)
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	731.469.524.000	636.420.946.000	636.420.946.000	(95.048.578.000)
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	14.547.178.384	17.747.178.384	17.747.178.384	3.200.000.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9.780.657.941	9.780.657.941	9.780.657.941	-
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan	9.780.657.941	9.780.657.941	9.780.657.941	-

Keterangan :

Kolom 3 : Pagu Induk Pada APBD 2025 yang sudah di tetapkan

Kolom 4 : Pagu hasil efisiensi (struktur terakhir)

Kolom 5 : Pagu hasil efisiensi (struktur terakhir) dan di proyeksikan dengan Silpa hasil Audit Pada LHP Tahun 2024 oleh BPK RI

BAB III

PERUBAHAN PRIORITAS DAN FLAPON ANGGARAN SEMENTARA MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Rencana perubahan belanja pada APBD Tahun Anggaran 2025 didasarkan pada perubahan kondisi anggaran untuk mengakomodir perubahan – perubahan kebijakan yang terjadi pada tahun 2025.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025 PER. TANGGAL 30 JUNI 2025

5	BELANJA DAERAH	711.351.456.655,69	300.787.989.674,01	42,28
5.1	BELANJA OPERASI	517.995.744.487,66	232.187.841.160,60	44,82
5.1.01	Belanja Pegawai	350.242.511.533,30	190.960.809.326,60	54,52
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.097.282.966,36	28.487.269.445,00	19,36
5.1.03	Belanja Bunga	6.796.600.000,00	3.286.924.226,00	48,36
5.1.05	Belanja Hibah	13.859.349.988,00	9.452.838.163,00	68,20
	JUMLAH BELANJA OPERASI	517.995.744.487,66	232.187.841.160,60	44,82
5.2	BELANJA MODAL	55.368.365.741,65	2.052.101.288,41	3,70
5.2.01	Belanja Modal Tanah	280.338.000,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.078.251.642,06	807.781.775,00	2,87
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18.961.005.814,59	596.855.513,41	3,14
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.998.453.675,00	549.964.000,00	9,16
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	697.816.610,00	0,00	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.352.500.000,00	97.500.000,00	7,20
	JUMLAH BELANJA MODAL	55.368.365.741,65	2.052.101.288,41	3,70
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	754.485.646,13	204.088.093,00	27,04
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	754.485.646,13	204.088.093,00	27,04
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	754.485.646,13	204.088.093,00	27,04
5.4	BELANJA TRANSFER	137.232.860.780,25	66.343.959.132,00	48,34
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.007.291.343,10	0,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	135.225.569.437,15	66.343.959.132,00	49,06
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	137.232.860.780,25	66.343.959.132,00	48,34
	JUMLAH BELANJA	711.351.456.655,69	300.787.989.674,01	42,28

Realisasi Belanja pada semester pertama APBD baru mencapai 42% yakni sebesar Rp300.787.989.674,01 dari total anggaran belanja sebesar Rp711.351.456.655,69 ini menunjukkan realisasi belanja yang masih rendah dibandingkan dengan prediksi pencapaian pada semester pertama, hal ini diakibatkan adanya pengaruh pemberlakuan pencairan

anggaran sesuai dengan sumber dana yang ada, hal ini sangat mempengaruhi capaian realisasi belanja.

3.1. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Urusan Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Sedangkan urusan pemerintahan konkuren adalah urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar. Pembagian urusan pemerintahan konkuren didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

Page | 8

Adapun urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan umum dan penataan ruang; Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan urusan sosial. Sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi Tenaga kerja; Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan hidup; Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; Pemberdayaan masyarakat dan desa; Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; Perhubungan; Komunikasi dan informatika; Koperasi, usaha kecil dan menengah; Penanaman modal; Kepemudaan dan olahraga; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan; Kearsipan. Selain dua urusan

tersebut, urusan lainnya yaitu Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan ini merupakan urusan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah, yang meliputi Kelautan dan perikanan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; Energi dan Sumberdaya mineral; Perdagangan; Perindustrian; dan Transmigrasi.

Sedangkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditempatkan ke dalam urusan Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat berdasarkan amanat Pasal 9 ayat 5 dan Pasal 25 pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perubahan Program dan kegiatan tahun 2025 disusun berdasarkan Perubahan Kebijakan Umum APBD tahun 2025 yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Perubahan Program dan kegiatan tersebut dirangkum pada pembagian urusan yang dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Gorontalo Utara. Rekapitulasi perubahan plafon anggaran menurut perangkat pemerintahan dapat dilihat pada lampiran.

Page | 9

3.2. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan

Setiap organisasi perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara diharuskan untuk menyusun dan mengajukan rencana perubahan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta anggarannya masing-masing yang akan dilaksanakan selama satu tahun anggaran sesuai dengan perencanaan lima tahunan dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra), perencanaan satu tahunan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja). Guna memudahkan perangkat daerah dalam penyusunan perubahan anggaran dan mengevaluasi rencana anggaran yang diusulkan maka perlu

ditetapkan perubahan plafon anggaran yang merupakan batas atas rencana anggaran belanja setiap perangkat daerah. Perubahan plafon anggaran tersebut dapat ditetapkan bagi setiap urusan pemerintahan, fungsi, dan program, serta kesuaian antara tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perubahan plafon anggaran sementara berdasarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dibagi berdasarkan urusan mengalami perubahan yang dapat dilihat pada lampiran.

3.3. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga

Perubahan Plafon anggaran sementara untuk Belanja Operasi Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer berdasarkan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, diprediksi mengalami perubahan yang disebabkan penyesuaian SiLPA tahun 2024 sesuai hasil audit laporan Keuangan tahun 2024 dan terdapat penyesuaian dengan adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi belanja. Informasi perubahan belanja tersebut dapat dijabarkan pada Tabel berikut:

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 2025

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK BELANJA PEGAWAI, BARANG DAN JASA, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BELANJA BAGI HASIL, BELANJA BANTUAN KEUANGAN, DAN BELANJA TIDAK TERDUGA DAN BELANJA TRANSFER

Norek	Uraian	PREDIKSI PERUBAHAN			
		AWAL	setelah efisiesnsi	Asumsi Perubahan	Lebih/(Kurang)
1	2	3	4	5	6 =(5-3)
5	BELANJA DAERAH	803.200.034.656	711.351.456.656	702.085.479.144	(101.114.555.511)
5.1	BELANJA OPERASI	535.617.002.809	517.995.744.488	513.729.766.976	(21.887.235.833)
5.1.1	Belanja Pegawai	350.242.511.533	350.242.511.533	350.242.511.533	-
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	172.921.379.450	147.097.282.966	142.831.305.455	(30.090.073.996)
5.1.3	Belanja Bunga	6.796.600.000	6.796.600.000	6.796.600.000	-
	Belanja Subsidi				-
5.1.5	Belanja Hibah	4.656.511.825	13.859.349.988	13.859.349.988	9.202.838.163
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.000.000.000	-	-	(1.000.000.000)
5.2	BELANJA MODAL	128.350.171.067	55.368.365.742	52.368.365.742	(75.981.805.325)
5.2.1	Belanja Modal Tanah	280.338.000	280.338.000	280.338.000	-
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.171.395.127	28.078.251.642	26.078.251.642	(4.093.143.485)
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24.748.552.815	18.961.005.815	18.961.005.815	(5.787.547.000)
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	71.015.865.365	5.998.453.675	4.998.453.675	(66.017.411.690)
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	697.816.610	697.816.610	697.816.610	-
	Belanja Modal Aset Lainnya	1.436.203.150	1.352.500.000	1.352.500.000	(83.703.150)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000	754.485.646	754.485.646	(1.245.514.354)
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	754.485.646	754.485.646	(1.245.514.354)
5.4	BELANJA TRANSFER	137.232.860.780	137.232.860.780	135.232.860.780	(2.000.000.000)
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	2.007.291.343	2.007.291.343	2.007.291.343	-
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	135.225.569.437	135.225.569.437	133.225.569.437	(2.000.000.000)

Keterangan :

Kolom 3 : Pagu Induk Pada APBD 2025 yang sudah di tetapkan

Kolom 4 : Pagu hasil efisiensi (struktur terakhir)

Kolom 5 : Pagu hasil efisiensi (struktur terakhir) dan di proyeksikan dengan Silpa hasil Audit Pada LHP Tahun 2024 oleh BPK RI

BAB IV

RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

1. Kebijakan Umum Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Umum Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 diarahkan untuk memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025, SiLPA Tahun 2025 berdasarkan hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 yang telah di audit oleh BPK sebesar Rp9.890.256.629,60 mengalami penurunan sebesar Rp9.040.704.270,09 atau 48 % dari yang telah dianggarkan yaitu sebesar Rp18.930.960.899,69.

2. Kebijakan Umum Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan Umum Pengeluaran Pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah investasi ini dilakukan dalam bentuk penambahan penyertaan modal.

Page | 12

Norek	Uraian	PREDIKSI PERUBAHAN			
		AWAL	setelah efisiesnsi	Asumsi Perubahan	Lebih/(Kurang)
1	2	3	4	5	6 =(5-3)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	18.930.960.900	18.930.960.900	9.890.256.630	(9.040.704.270)
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	18.930.960.900	18.930.960.900	9.890.256.630	(9.040.704.270)
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	19.856.200.000	19.856.200.000	19.856.200.000	-
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	-
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	18.356.200.000	18.356.200.000	18.356.200.000	-
	PEMBIAYAAN NETTO	(925.239.100)	(925.239.100)	(9.965.943.370)	(9.040.704.270)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0	0	0	(0)

Keterangan :

Kolom 3 : Pagu Induk Pada APBD 2025 yang sudah di tetapkan

Kolom 4 : Pagu hasil efisiensi (struktur terakhir)

Kolom 5 : Pagu hasil efisiensi (struktur terakhir) dan di proyeksikan dengan Silpa hasil Audit Pada LHP Tahun 2024 oleh BPK RI

BAB V

PENUTUP

Penyusunan dokumen Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara untuk menjamin konsistensi dan sinergitas antara perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran, yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Perubahan PPAS pada tahun anggaran 2025 yang telah disepakati antara eksekutif dengan legislatif, selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) perangkat daerah, dengan tetap mempertimbangkan kemungkinan penambahan atau pengurangan terhadap program/kegiatan/sub kegiatan dan pagu anggaran definitif yang belum ditampung dalam Nota Kesepakatan Perubahan PPAS yang dilakukan pada saat proses pembahasan Rancangan Perubahan APBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan Perubahan PPAS.

Demikian dokumen Perubahan PPAS tahun anggaran 2025 disepakati sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2025. Semoga harapan Daerah untuk tercapainya sasaran pembangunan secara Efektif dan Efisien dapat terlaksana dan mendukung pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan serentak tahun 2024 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Gorontalo Utara 2024-2026.

Gorontalo Utara, 29 Juli 2025

RUPATI GORONTALO UTARA,

THARIQ MODANGGU



PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON SEMENTARA PER SKPD

TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA SKPD/UNIT ORGANISASI	PAGU			Lebih/(Kurang)
		*Induk	**Efisiensi	***Perubahan	
1	Dinas Pendidikan	233.735.920.047,00	226.842.265.807,96	221.851.735.960,19	(11.884.184.086,82)
2	Dinas Kesehatan	84.924.864.108,96	85.484.632.314,24	83.603.970.403,33	(1.320.893.705,63)
3	Rumah Sakit Zainal Umar Sidiki	49.795.477.000,00	49.295.477.000,00	48.807.451.777,70	(988.025.222,30)
4	Puskesmas Kwardang	1.893.511.882,00	1.893.511.882,00	1.874.766.114,37	(18.745.767,63)
5	Puskesmas Limbato	703.775.718,00	703.775.718,00	696.808.338,39	(6.967.379,61)
6	Puskesmas Sumalata	1.229.195.639,00	1.229.195.639,00	1.217.026.602,17	(12.169.036,83)
7	Puskesmas Molingkapoto	1.827.757.380,00	1.827.757.380,00	1.809.662.581,94	(18.094.798,06)
8	Puskesmas Tolinggula	1.233.832.309,00	1.233.832.309,00	1.221.617.369,14	(12.214.939,86)
9	Puskesmas Dambalo	1.370.990.190,00	1.370.990.190,00	1.357.417.387,12	(13.572.802,88)
10	Puskesmas Gentuma	1.454.256.153,00	1.454.256.153,00	1.439.859.017,09	(14.397.135,91)
11	Puskesmas Biau	989.812.088,00	989.812.088,00	980.012.948,33	(9.799.139,67)
12	Puskesmas Atinggola	1.711.132.483,00	1.711.132.483,00	1.694.192.271,42	(16.940.211,58)
13	Puskesmas Ponelo	899.908.467,20	899.908.467,20	890.999.373,37	(8.909.093,83)
14	Puskesmas Anggrek	1.441.355.937,00	1.441.355.937,00	1.427.086.513,22	(14.269.423,78)
15	Puskesmas Dulukapa	1.161.067.048,00	1.161.067.048,00	1.149.572.484,22	(11.494.563,78)
16	Puskesmas Buloilu	873.295.364,00	873.295.364,00	864.649.739,90	(8.645.624,10)
17	Puskesmas Ilangata	1.166.591.888,00	1.166.591.888,00	1.155.042.628,31	(11.549.259,69)
18	Puskesmas Monano	1.186.591.272,00	1.186.591.272,00	1.174.844.018,41	(11.747.253,59)
19	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	82.330.841.360,00	9.672.364.748,00	9.643.347.653,76	(72.687.493.706,24)
20	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	2.725.463.002,00	2.683.753.002,00	2.657.183.847,28	(68.279.154,72)
21	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	3.027.658.000,00	3.583.198.652,52	3.547.724.985,86	520.066.985,86
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.502.202.279,00	2.459.701.777,00	2.435.350.729,41	(66.851.549,59)
23	Dinas Sosial	2.912.457.738,81	2.818.355.596,31	2.790.453.875,91	(122.003.862,90)
24	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.595.772.474,03	2.270.579.265,65	2.248.100.530,92	(347.671.943,11)
25	Dinas Ketahanan Pangan	2.299.020.218,00	2.250.973.098,00	2.228.688.464,33	(70.331.753,67)
26	Dinas Lingkungan Hidup	2.606.101.000,00	2.632.811.799,00	2.606.746.962,19	645.962,19
27	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.442.858.910,00	2.423.876.783,05	2.399.880.402,90	(42.978.507,10)
28	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.531.565.255,00	4.304.581.914,00	4.261.966.553,05	(269.598.701,95)
29	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.798.297.176,00	8.798.297.176,00	8.711.194.033,96	(87.103.142,04)
30	Dinas Perhubungan	3.483.305.300,00	3.699.437.278,37	3.662.812.849,31	179.507.549,31
31	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.038.548.671,96	3.870.248.623,96	3.831.933.162,58	(206.615.509,38)
32	Dinas Penanaman Modal	2.607.267.407,94	2.545.345.205,93	2.520.146.288,39	(87.121.119,55)
33	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.964.722.000,00	1.942.508.955,20	1.923.278.116,54	(41.443.883,46)
34	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.521.287.042,04	2.494.287.042,04	2.469.593.600,32	(51.693.441,72)
35	Dinas Kelautan dan Perikanan	11.806.200.663,92	3.467.082.404,46	3.432.758.288,66	(8.373.442.375,26)
36	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2.537.773.529,24	2.552.895.205,12	2.527.621.542,59	(10.151.986,65)
37	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	3.158.893.000,00	3.102.368.000,00	3.071.654.556,80	(87.238.443,20)
38	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	7.966.519.851,86	8.342.068.609,86	8.259.482.130,62	292.962.278,76
39	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2.812.846.000,00	2.765.721.000,00	2.738.340.362,10	(74.505.637,90)
40	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	2.709.385.922,36	2.683.542.522,36	2.656.975.451,39	(52.410.470,97)
41	Sekretariat Daerah			-	-
42	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	328.199.989,00	251.000.789,00	248.515.881,19	(79.684.107,81)
43	Bagian Kesejahteraan Rakyat	3.666.099.540,00	2.601.350.790,00	2.575.597.417,18	(1.090.502.122,82)
44	Bagian Hukum	604.820.915,53	483.195.915,53	478.412.275,97	(126.408.639,56)
45	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	286.200.000,00	229.200.000,00	226.930.920,00	(59.269.080,00)
46	Bagian Administrasi Pembangunan	404.922.995,20	364.172.995,20	360.567.682,55	(44.355.312,65)
47	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	403.977.004,80	372.497.004,80	368.809.284,45	(35.167.720,35)
48	Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi	323.200.000,00	257.969.023,00	255.415.129,67	(67.784.870,33)
49	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	693.474.399,96	615.488.963,46	609.395.622,72	(84.078.777,24)
50	Bagian Umum	16.655.024.155,51	14.736.774.453,81	14.590.880.386,72	(2.064.143.768,79)
51	Sekretariat DPRD	30.445.214.000,00	26.330.780.000,00	26.105.547.099,93	(4.339.666.900,07)
52	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	6.003.524.719,00	5.559.034.719,00	5.504.000.275,28	(499.524.443,72)
53	Badan Keuangan	157.528.598.911,19	156.689.334.450,21	156.532.645.115,76	(995.953.795,43)
54	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	2.934.968.000,00	2.698.165.937,56	2.671.454.094,78	(263.513.905,22)
55	Inspektorat	12.623.222.893,00	8.927.872.893,00	8.839.486.951,36	(3.783.735.941,64)
56	Kecamatan Anggrek	1.215.321.998,00	1.183.935.058,00	1.172.214.100,93	(43.107.897,07)

57	Kecamatan Monano	1.332.032.834,00	1.304.146.172,20	1.291.235.125,10	(40.797.708,90)
58	Kecamatan Sumalata	1.414.454.000,00	1.394.677.930,00	1.380.870.618,49	(33.583.381,51)
59	Kecamatan Sumalata Timur	1.432.821.534,00	1.398.761.534,00	1.384.913.794,81	(47.907.739,19)
60	Kecamatan Kwandang	1.717.823.717,61	1.693.240.637,61	1.676.477.555,30	(41.346.162,31)
61	Kecamatan Tomilito	1.517.689.043,00	1.486.952.138,51	1.472.231.312,34	(45.457.730,66)
62	Kecamatan Gentuma Raya	1.513.801.406,00	1.486.203.026,00	1.471.489.616,04	(42.311.789,96)
63	Kecamatan Atinggola	1.636.182.346,60	1.615.799.726,60	1.599.803.309,31	(36.379.037,29)
64	Kecamatan Biau	1.471.993.995,99	1.441.593.654,99	1.427.321.877,81	(44.672.118,18)
65	Kecamatan Tolinggula	1.574.117.677,00	1.548.887.677,00	1.533.553.689,00	(40.563.988,00)
66	Kecamatan Ponelo Kepulauan	1.196.167.344,00	1.177.982.344,00	1.166.320.318,79	(29.847.025,21)
67	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.297.859.459,98	13.372.991.222,98	13.299.439.771,25	9.001.580.311,27
JUMLAH		803.200.034.655,69	711.351.456.655,69	702.085.479.144,20	(101.114.555.511,49)

KETERANGAN

- * Pagu Induk Pada APBD 2025 yang sudah di tetapkan
- ** Pagu hasil efisiensi (struktur terakhir)
- *** Pagu hasil efisiensi (struktur terakhir) dan di proyeksikan dengan Silpa hasil Audit Pada LHP Tahun 2024 oleh BPK RI

RINCIAN PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA SKPD PER PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	ANGGARAN		LEBIH/(KURANG)
								INDUK	ASUMSI PERUBAHAN	
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		-	-
2	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	-
3	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		-	-
4	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		-	-
5	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan, DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1.300.153.150,00	1.200.000.000,00	100.153.150,00
6	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		-	-
7	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan, DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	168.913.000,00	168.913.000,00	-
8	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-	-
9	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	845.500.000,00	750.000.000,00	95.500.000,00
10	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	701.400.000,00	701.400.000,00	-
11	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2.256.221.725,00	638.621.725,00	1.617.600.000,00
12	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	DAK Non Fisik-BOS Reguler, DAK Non Fisik-BOS Kinerja	12.407.950.000,00	12.000.950.000,00	407.000.000,00
13	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	-
14	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		-	-

[illegible]

[illegible]

51	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	120.000.000,00	120.000.000,00	-
52	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	-
53	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan, DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	1.668.946.000,00	1.000.000.000,00	668.946.000,00
54	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	37.435.000,00	18.760.000,00	18.675.000,00
55	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD		-	-
56	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	-
57	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2.066.850.000,00	1.607.550.000,00	459.300.000,00
58	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	289.100.000,00	289.100.000,00	-
59	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	935.000.000,00	460.000.000,00	475.000.000,00
60	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.883.644.000,00	2.883.644.000,00	-
61	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	-
62	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	-
63	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	-
64	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	6.600.000,00	6.600.000,00	-
65	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	-
66	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD		-	-
67	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	10.000.000,00	10.000.000,00	-
68	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD		-	-

87	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	-
88	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	-
89	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	-
90	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	-
91	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),Dana Alokasi Umum (DAU),DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan,DAK Non Fisik-TPG PNSD,DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD,DAK Non Fisik-TKG PNSD	193.109.580.322,00	186.593.601.232,96	6.515.979.089,04
92	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
93	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
94	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
95	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
96	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
97	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
98	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
99	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
100	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
101	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
102	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-

103	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	-	-
104	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-
105	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-
106	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	-	-	-
107	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	2.480.000.000,00	2.280.000.000,00	200.000.000,00
108	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-
109	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	-	-	-
110	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-
111	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	-	-	-
112	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-
113	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	163.238.000,00	163.238.000,00	-
114	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-
115	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-
116	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	15.968.000.000,00	15.572.400.000,30	395.599.999,70
117	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.527.453.190,00	4.327.453.190,00	200.000.000,00

133	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	-
134	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	-
135	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	110.826.000,00	110.826.000,00	-
136	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya,DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan,DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	558.693.300,00	558.693.300,00	-
137	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	59.529.510,00	56.529.510,00	3.000.000,00
138	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	67.500.000,00	66.000.000,00	1.500.000,00
139	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	40.892.000,00	38.892.000,00	2.000.000,00
140	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	76.844.000,00	74.844.000,00	2.000.000,00
141	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	21.198.000,00	21.198.000,00	-
142	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	33.093.000,00	33.093.000,00	-
143	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	83.051.810,00	81.051.810,00	2.000.000,00
144	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	80.336.000,00	79.500.000,00	836.000,00
145	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	113.346.000,00	112.346.000,00	1.000.000,00
146	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	79.357.000,00	69.784.197,12	9.572.802,88
147	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	42.288.000,00	42.288.000,00	-

					PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
148	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	59.495.820,00	59.495.820,00	-
149	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	27.217.000,00	27.217.000,00	-
150	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	43.979.000,00	43.979.000,00	-
151	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	86.091.000,00	83.091.000,00	3.000.000,00
152	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya,DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan,DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	315.881.539,00	315.881.539,00	-
153	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-	-
154	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	300.000,00	300.000,00	-
155	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-	-
156	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-	-
157	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-	-
158	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-	-
159	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-	-
160	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-	-
161	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-	-

[illegible]

[illegible]

207	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	34.000.000,00	32.500.000,00	1.500.000,00
208	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	41.600.000,00	40.600.000,00	1.000.000,00
209	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	39.200.000,00	36.200.000,00	3.000.000,00
210	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	43.200.000,00	43.200.000,00	-
211	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	55.950.000,00	53.950.000,00	2.000.000,00
212	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	76.000.000,00	76.000.000,00	-
213	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	23.100.000,00	23.100.000,00	-
214	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	46.300.000,00	46.300.000,00	-
215	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	63.600.000,00	60.600.000,00	3.000.000,00
216	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya,DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan,DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	386.226.193,00	286.226.193,00	100.000.000,00
217	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	850.000,00	850.000,00	-
218	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	6.680.000,00	6.680.000,00	-
219	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	1.774.000,00	1.774.000,00	-
220	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	774.000,00	774.000,00	-
221	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	5.580.000,00	5.080.000,00	500.000,00

					PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
222	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	850.000,00	850.000,00	-
223	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	778.000,00	778.000,00	-
224	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	2.295.190,00	2.295.190,00	-
225	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	11.128.000,00	11.128.000,00	-
226	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	3.534.000,00	3.534.000,00	-
227	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	814.000,00	814.000,00	-
228	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	3.600.000,00	3.600.000,00	-
229	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORongan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	6.008.000,00	6.008.000,00	-
230	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORongan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	976.000,00	976.000,00	-
231	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORongan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	760.000,00	760.000,00	-
232	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORongan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas- BOK Kabupaten/Kota	52.005.000,00	52.005.000,00	-
233	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORongan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	2.400.000,00	2.400.000,00	-
234	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORongan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	12.013.000,00	11.013.000,00	1.000.000,00
235	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORongan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.800.000,00	4.800.000,00	-

236	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		2.400.000,00	2.400.000,00	-
237	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		10.800.000,00	9.800.000,00	1.000.000,00
238	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		2.400.000,00	2.400.000,00	-
239	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		2.400.000,00	2.400.000,00	-
240	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		4.800.000,00	4.800.000,00	-
241	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		25.200.000,00	25.200.000,00	-
242	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		4.800.000,00	4.800.000,00	-
243	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORongan DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		2.400.000,00	2.400.000,00	-
244	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORongan DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		7.200.000,00	7.200.000,00	-
245	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORongan DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		5.000.000,00	5.000.000,00	-
246	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORongan DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		2.400.000,00	2.400.000,00	-
247	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORongan DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		2.400.000,00	2.400.000,00	-
248	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORongan DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	700.396.400,00	700.396.400,00	-
249	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORongan DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-
250	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan		-	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

295	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	39.600.000,00	36.600.000,00	3.000.000,00
296	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-
297	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	-	-
298	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	17.000.000,00	17.000.000,00	-
299	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	14.000.000,00	13.000.000,00	1.000.000,00
300	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	21.600.000,00	20.600.000,00	1.000.000,00
301	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	25.600.000,00	25.600.000,00	-
302	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	16.200.000,00	16.200.000,00	-
303	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	12.000.000,00	12.000.000,00	-
304	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	20.400.000,00	20.400.000,00	-
305	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	16.500.000,00	16.500.000,00	-
306	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	17.500.000,00	17.500.000,00	-
307	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	29.400.000,00	29.400.000,00	-
308	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	22.800.000,00	22.800.000,00	-
309	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	19.400.000,00	19.400.000,00	-

[illegible]

324	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-	
325	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-	
326	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	2.500.000,00	2.500.000,00	-
327	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-	
328	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-	
329	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	-	
330	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	161.107.672,00	161.107.672,00	-
331	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	312.295.000,00	309.295.000,00	3.000.000,00
332	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	188.160.000,00	185.160.000,00	3.000.000,00
333	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	231.968.000,00	229.968.000,00	2.000.000,00
334	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	245.759.000,00	241.759.000,00	4.000.000,00
335	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	150.232.000,00	148.732.000,00	1.500.000,00
336	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	225.748.000,00	220.748.000,00	5.000.000,00
337	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	220.186.000,00	217.807.060,14	2.378.939,86
338	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	242.313.000,00	238.713.000,00	3.600.000,00

					PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
339	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	256.153.000,00	253.153.000,00	3.000.000,00
340	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	224.764.000,00	222.764.000,00	2.000.000,00
341	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	157.812.000,00	153.812.000,00	4.000.000,00
342	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORongan DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	210.372.000,00	205.572.860,33	4.799.139,67
343	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORongan DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	151.271.000,00	148.271.000,00	3.000.000,00
344	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORongan DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	221.485.000,00	219.485.000,00	2.000.000,00
345	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORongan DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	282.341.000,00	280.341.000,00	2.000.000,00
346	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORongan DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	900.000,00	900.000,00	-
347	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORongan DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	1.958.000,00	1.958.000,00	-
348	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORongan DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	6.000.000,00	6.000.000,00	-
349	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORongan DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	2.000.000,00	2.000.000,00	-
350	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORongan DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	15.250.000,00	15.250.000,00	-
351	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORongan DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	1.800.000,00	1.800.000,00	-
352	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORongan DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	1.500.000,00	1.500.000,00	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

443	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	82.376.000,00	80.376.000,00	2.000.000,00
444	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),Dana Alokasi Umum (DAU),Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya,DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan,Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok,Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	3.386.641.941,00	3.127.891.941,00	258.750.000,00
445	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	48.465.000,00	48.465.000,00	-
446	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan,DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan,Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	10.000.000.949,40	9.119.339.038,49	880.661.910,91
447	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU),DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	1.159.738.557,00	1.081.998.557,00	77.740.000,00
448	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-
449	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan,DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas,Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	967.693.973,00	963.753.761,42	3.940.211,58
450	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan,DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas,Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	709.050.639,00	707.050.639,00	2.000.000,00
451	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan,DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas,Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	833.794.937,00	830.794.937,00	3.000.000,00
452	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan,DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas,Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	643.139.272,00	639.392.018,41	3.747.253,59
453	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan,DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas,Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	593.323.048,00	589.828.484,22	3.494.563,78
454	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan,DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas,Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	760.831.190,00	760.831.190,00	-
455	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan,DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas,Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	695.355.309,00	693.355.309,00	2.000.000,00

456	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	807.152.153,00	805.152.153,00	2.000.000,00
457	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.105.189.882,00	1.100.189.000,00	5.000.882,00
458	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	439.415.364,00	434.769.739,90	4.645.624,10
459	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	468.962.088,00	465.962.088,00	3.000.000,00
460	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	625.991.888,00	620.442.628,31	5.549.259,69
461	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	333.023.718,00	329.056.338,39	3.967.379,61
462	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	505.668.647,20	501.759.553,37	3.909.093,83
463	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.030.613.380,00	1.026.518.581,94	4.094.798,06
464	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU), Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	364.943.800,00	364.943.800,00	-
465	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota		-	-
466	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
467	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota		-	-
468	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	-
469	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	2.000.000,00	2.000.000,00	-

[illegible]

485	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
486	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan		-	-
487	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
488	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
489	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU), Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	2.851.200.000,00	2.851.200.000,00	-
490	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	9.372.600.000,00	8.788.199.999,40	584.400.000,60
491	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
492	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	780.502.897,90	780.502.897,90	-
493	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
494	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	73.697.099,00	73.697.099,00	-
495	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	86.940.799,09	86.940.799,09	-
496	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-

497	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	94.939.929,00	94.939.929,00	-
498	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota		-	-
499	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	-
500	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	-
501	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	-
502	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	-
503	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	-
504	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	-
505	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	-
506	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	-
507	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	-
508	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	-

[illegible]

[illegible]

537	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	-
538	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	-
539	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	-
540	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	-
541	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	-
542	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	-
543	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	-
544	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	-
545	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	-
546	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	89.700.000,00	89.700.000,00	-
547	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.370.000,00	4.370.000,00	-
548	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	20.498.000,00	19.328.963,17	1.169.036,83
549	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	5.553.000,00	5.553.000,00	-
550	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	9.437.000,00	9.437.000,00	-

						(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
551	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	3.499.000,00	3.499.000,00	-
552	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	7.995.000,00	7.995.000,00	-
553	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	2.416.000,00	2.416.000,00	-
554	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	11.951.000,00	11.951.000,00	-
555	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	3.503.000,00	3.503.000,00	-
556	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.172.000,00	4.172.000,00	-
557	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	3.000.000,00	3.000.000,00	-
558	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	2.460.000,00	2.460.000,00	-
559	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	5.832.000,00	5.832.000,00	-
560	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	14.058.000,00	14.058.000,00	-
561	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	9.601.000,00	9.601.000,00	-

562	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
563	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
564	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
565	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
566	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	54.857.759.034,72	55.339.017.240,00	- 481.258.205,28
567	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
568	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
569	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
570	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
571	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
572	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.350.777.000,00	1.350.777.000,00	-
573	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
574	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
575	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
576	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
577	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
578	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
579	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

706	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
707	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
708	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
709	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
710	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
711	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
712	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
713	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
714	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
715	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
716	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
717	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
718	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pendapatan dari BLUD	18.000.000.000,00	17.991.974.778,00	8.025.222,00
719	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya, Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan		-	-
720	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
721	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
722	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-

						Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
723	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
724	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU),DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum,DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	5.774.063.000,00	-	5.774.063.000,00
725	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
726	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
727	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU),DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum		-	-
728	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
729	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
730	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
731	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
732	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	20.960.000,00	8.960.000,00	12.000.000,00
733	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-

						dalam Daerah Kabupaten/Kota				
734	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
735	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
736	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
737	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	1.482.000.000,00	391.163.000,00	1.090.837.000,00
738	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Dana Alokasi Umum (DAU), DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	7.432.800.000,00	2.700.000.000,00	4.732.800.000,00
739	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	493.000.000,00	166.800.000,00	326.200.000,00
740	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
741	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
742	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU), DBH Sawit, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum, DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah, DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani), Opsi PKB	63.550.511.500,00	2.775.016.405,76	60.775.495.094,24
743	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU), DBH Sawit	592.720.000,00	590.720.000,00	2.000.000,00

744	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
745	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
746	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
747	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
748	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTTR) Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
749	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTTR) Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
750	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
751	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
752	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
753	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
754	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)	2.911.026.860,00	2.937.928.248,00	- 26.901.388,00
755	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
756	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
757	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
758	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
759	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	25.000.000,00	25.000.000,00	-
760	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-

761	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
762	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
763	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
764	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
765	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
766	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
767	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
768	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	39.000.000,00	38.000.000,00	1.000.000,00
769	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU)	9.760.000,00	9.760.000,00	-
770	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
771	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
772	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
773	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
774	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
775	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	349.999.670,00	340.430.515,28	9.569.154,72
776	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
777	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-

778	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	
779	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	120.420.000,00	110.620.000,00	9.800.000,00
780	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	77.500.000,00	37.590.000,00	39.910.000,00
781	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),Dana Alokasi Umum (DAU)	1.755.843.622,00	1.755.843.622,00	-
782	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU),Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	93.000.000,00	90.000.000,00	3.000.000,00
783	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-
784	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	28.200.000,00	28.200.000,00	-
785	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	18.000.000,00	18.000.000,00	-
786	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-
787	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	282.499.710,00	276.499.710,00	6.000.000,00
788	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dana Bagi Hasil (DBH),Dana Alokasi Umum (DAU)	9.750.204,00	7.510.204,00	2.240.000,00
789	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dana Bagi Hasil (DBH),Dana Alokasi Umum (DAU)	5.249.796,00	2.624.898,00	2.624.898,00
790	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Dana Bagi Hasil (DBH),Dana Alokasi Umum (DAU)	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
791	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Dana Bagi Hasil (DBH),Dana Alokasi Umum (DAU)	13.000.000,00	10.880.000,00	2.120.000,00

				PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
792	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dana Bagi Hasil (DBH),Dana Alokasi Umum (DAU)	61.569.092,00	45.476.400,00	16.092.692,00
793	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dana Bagi Hasil (DBH),Dana Alokasi Umum (DAU)	30.430.908,00	25.430.908,00	5.000.000,00
794	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),Dana Bagi Hasil (DBH),Dana Alokasi Umum (DAU)	2.071.258.000,00	2.663.376.242,52	- 592.118.242,52
795	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH),Dana Alokasi Umum (DAU)	1.000.000,00	1.000.000,00	-
796	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH),Dana Alokasi Umum (DAU)	13.500.000,00	10.000.000,00	3.500.000,00
797	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
798	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH),Dana Alokasi Umum (DAU)	500.000,00	500.000,00	-
799	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),Dana Bagi Hasil (DBH),Dana Alokasi Umum (DAU)	35.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00
800	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
801	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH),Dana Alokasi Umum (DAU)	13.000.000,00	10.000.000,00	3.000.000,00
802	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH),Dana Alokasi Umum (DAU)	21.600.000,00	19.600.000,00	2.000.000,00

803	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU)	685.800.000,00	675.326.333,34	10.473.666,66
804	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
805	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	64.000.000,00	60.000.000,00	4.000.000,00
806	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
807	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
808	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
809	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
810	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
811	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
812	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
813	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
814	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	372.400.000,00	332.048.452,41	40.351.547,59

815	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
816	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
817	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
818	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
819	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
820	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
821	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
822	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Dana Alokasi Umum (DAU)	100.000.000,00	100.000.000,00	-
823	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	25.000.004,00	12.500.002,00	12.500.002,00
824	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)	1.803.002.275,00	1.793.002.275,00	10.000.000,00
825	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
826	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-

839	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH)	1.800.000,00	1.800.000,00	-
840	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)			-
841	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)			-
842	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)			-
843	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	200.000.000,00	196.000.000,00	4.000.000,00
844	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Dana Alokasi Umum (DAU)			-
845	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	222.003.147,46	208.578.147,46	13.425.000,00
846	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)			-
847	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)			-
848	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dana Alokasi Umum (DAU)			-
849	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dana Alokasi Umum (DAU)			-
850	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dana Alokasi Umum (DAU)			-
851	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	Dana Alokasi Umum (DAU)			-

						Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				
852	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dana Alokasi Umum (DAU),DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	38.028.489,10	31.778.489,10	6.250.000,00
853	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dana Alokasi Umum (DAU),DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	36.971.030,10	25.971.030,10	11.000.000,00
854	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
855	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dana Alokasi Umum (DAU)	50.000.000,00	50.000.000,00	-
856	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
857	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
858	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
859	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
860	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Dana Alokasi Umum (DAU)	10.000.000,00	10.000.000,00	-
861	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-

						Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				
862	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
863	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Dana Alokasi Umum (DAU)	15.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
864	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU), Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan	74.999.992,68	43.552.850,18	31.447.142,50
865	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
866	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
867	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	99.999.999,98	72.499.999,98	27.500.000,00
868	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan		-	-
869	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
870	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
871	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
872	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)	2.097.967.202,92	2.097.967.202,92	-
873	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
874	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
875	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
876	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	9.988.350,00	9.988.350,00	-

877	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
878	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
879	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
880	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
881	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
882	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	33.880.000,00	16.900.000,00	16.980.000,00
883	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
884	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
885	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.119.526,57	6.119.526,57	-
886	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
887	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
888	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
889	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	10.000.000,00	10.000.000,00	-
890	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
891	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU),Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	7.500.000,00	7.500.000,00	-
892	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
893	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
894	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	200.000.000,00	192.098.279,60	7.901.720,40

895	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
896	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU),DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	74.999.900,00	51.655.000,00	23.344.900,00
897	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU),DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	175.046.200,00	20.060.000,00	154.986.200,00
898	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan,DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	99.492.075,00	99.492.075,00	-
899	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	243.994.000,00	236.515.265,27	7.478.734,73
900	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan,DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	71.050.000,01	71.050.000,01	-
901	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan,DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	161.098.000,00	156.098.000,00	5.000.000,00
902	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan,DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	69.020.000,10	64.020.000,10	5.000.000,00
903	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),Dana Alokasi Umum (DAU)	1.361.823.270,54	1.361.823.270,54	-
904	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
905	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
906	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
907	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.000.110,00	714.000,00	286.110,00

908	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	116.559.998,38	34.490.000,00	82.069.998,38
909	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
910	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	27.132.000,00	13.566.000,00	13.566.000,00
911	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
912	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
913	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.676.920,00	6.676.920,00	-
914	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	54.000.000,00	-	54.000.000,00
915	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.780.000,00	3.780.000,00	-
916	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.100.000,00	3.160.000,00	1.940.000,00
917	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	125.000.000,00	125.000.000,00	-
918	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Ketahanan Pangan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
919	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Ketahanan Pangan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	100.000.000,00	100.000.000,00	-
920	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Ketahanan Pangan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Dana Bagi Hasil (DBH)	59.000.000,00	58.250.000,00	750.000,00
921	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Ketahanan Pangan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	30.000.000,00	25.700.000,00	4.300.000,00
922	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Ketahanan Pangan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Bagi Hasil (DBH),Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	229.000.000,00	209.715.366,33	19.284.633,67

923	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Ketahanan Pangan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
924	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Ketahanan Pangan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
925	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Ketahanan Pangan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
926	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Ketahanan Pangan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
927	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Ketahanan Pangan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),Dana Alokasi Umum (DAU)	1.653.020.028,00	1.653.020.028,00	-
928	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Ketahanan Pangan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
929	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Ketahanan Pangan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH)	1.074.840,00	1.074.840,00	-
930	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Ketahanan Pangan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH)	9.778.230,00	7.778.230,00	2.000.000,00
931	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Ketahanan Pangan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH)	2.065.500,00	1.555.500,00	510.000,00
932	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Ketahanan Pangan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
933	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Ketahanan Pangan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
934	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Ketahanan Pangan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH)	9.881.620,00	8.544.500,00	1.337.120,00
935	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Ketahanan Pangan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH),Dana Alokasi Umum (DAU)	59.370.000,00	24.220.000,00	35.150.000,00
936	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Ketahanan Pangan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	30.000.000,00	28.000.000,00	2.000.000,00
937	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Ketahanan Pangan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU),Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	93.000.000,00	90.000.000,00	3.000.000,00
938	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Ketahanan Pangan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH),Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	19.800.000,00	17.800.000,00	2.000.000,00
939	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Ketahanan Pangan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.030.000,00	3.030.000,00	-
940	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	100.000.000,00	100.000.000,00	-

941	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
942	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
943	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
944	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
945	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Penyimpanan sementara Limbah B3	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	529.000.000,00	480.589.298,00	48.410.702,00
946	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
947	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
948	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
949	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
950	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)	20.244.000,00	17.244.000,00	3.000.000,00
951	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
952	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
953	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
954	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)	1.848.614.150,00	1.913.735.826,00	- 65.121.676,00

955	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
956	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
957	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
958	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
959	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
960	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
961	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	12.000.350,00	6.000.175,00	6.000.175,00
962	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
963	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
964	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
965	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	44.242.500,00	40.242.500,00	4.000.000,00
966	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
967	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	39.000.000,00	35.935.163,19	3.064.836,81
968	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.050.500,00	5.050.500,00	-
969	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.949.500,00	7.949.500,00	-
970	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
971	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
972	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-

973	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dana Alokasi Umum (DAU),Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	204.284.137,91	195.287.757,76	8.996.380,15
974	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.896.300,00	7.896.300,00	-
975	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
976	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Dana Bagi Hasil (DBH),Dana Alokasi Umum (DAU),Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	32.327.400,00	2.927.400,00	29.400.000,00
977	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyusunan Profil Kependudukan	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
978	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),Dana Alokasi Umum (DAU)	1.782.332.105,84	1.825.808.956,54	- 43.476.850,70
979	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.366.112,17	3.366.112,17	-
980	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU),Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	20.925.305,65	15.925.305,65	5.000.000,00
981	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	2.448.000,00	2.448.000,00	-
982	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH),Dana Alokasi Umum (DAU),Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	87.537.837,76	54.478.860,11	33.058.977,65
983	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	-
984	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU),Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	20.451.481,00	20.451.481,00	-
985	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	106.967.990,00	101.967.990,00	5.000.000,00
986	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	39.000.000,00	39.000.000,00	-
987	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),Dana Bagi Hasil (DBH),Dana Alokasi Umum (DAU),Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	92.403.583,64	87.403.583,64	5.000.000,00

988	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	39.862.656,03	39.862.656,03	-
989	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	3.056.000,00	3.056.000,00	-
990	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
991	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
992	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	66.000.000,00	56.000.000,00	10.000.000,00
993	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
994	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
995	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
996	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
997	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
998	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2.283.200.000,00	2.203.101.298,05	80.098.701,95
999	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1000	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN,	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-

					LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				
1001	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	200.000.000,00	50.500.000,00	149.500.000,00
1002	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)	1.812.365.255,00	1.812.365.255,00	-
1003	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1004	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1005	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1006	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1007	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1008	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1009	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1010	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1011	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1012	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1013	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1014	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	150.000.000,00	130.000.000,00	20.000.000,00

1015	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	
1016	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	-	
1017	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-BOKB-KB	84.000.000,00	80.000.000,00	4.000.000,00
1018	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	-	
1019	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dana Alokasi Umum (DAU), DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan, DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB), DAK Non Fisik-BOKB-KB	3.224.132.588,00	3.200.132.588,00	24.000.000,00
1020	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	DAK Non Fisik-BOKB-KB	414.896.000,00	404.896.000,00	10.000.000,00
1021	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	DAK Non Fisik-BOKB-KB	125.000.000,00	125.000.000,00	-
1022	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	-	
1023	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Non Fisik-BOKB-KB	23.000.000,00	23.000.000,00	-
1024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan, DAK Non Fisik-BOKB-BOKB	1.149.663.200,00	1.129.560.057,96	20.103.142,04
1025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan, DAK Non Fisik-BOKB-KB	90.000.000,00	90.000.000,00	-
1026	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-BOKB-KB	573.160.000,00	553.160.000,00	20.000.000,00
1027	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan, DAK Non Fisik-BOKB-KB	148.203.000,00	148.203.000,00	-

1028	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	DAK Non Fisik-BOKB-BOKB, DAK Non Fisik-BOKB-KB	429.000.000,00	420.000.000,00	9.000.000,00
1029	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	DAK Non Fisik-BOKB-KB	941.800.000,00	941.800.000,00	-
1030	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)	1.595.442.388,00	1.595.442.388,00	-
1031	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1032	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan		-	-
1033	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU), DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan		-	-
1034	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan		-	-
1035	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU), DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan		-	-
1036	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan		-	-
1037	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DAK Non Fisik-BOKB-KB		-	-
1038	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			-	-
1039	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			-	-
1040	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain		-	-
1041	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	100.000.000,00	100.000.000,00	-

1042	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			-	-
1043	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Sumber Lain	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari	628.563.894,00	608.563.894,00	20.000.000,00
1044	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			-	-
1045	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			-	-
1046	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			-	-
1047	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			-	-
1048	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			-	-
1049	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			-	-
1050	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			-	-
1051	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
1052	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			-	-
1053	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota			-	-
1054	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota			-	-
1055	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
1056	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan			-	-

					LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
1057	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota			-	-
1058	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota			-	-
1059	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			-	-
1060	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			-	-
1061	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	25.000.000,00	12.450.000,00	12.550.000,00
1062	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)	2.106.940.536,00	2.345.720.014,37	- 238.779.478,37
1063	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	-
1064	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	-
1065	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah			-	-
1066	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	11.500.870,00	11.500.870,00	-
1067	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.500.000,00	1.402.500,00	1.097.500,00
1068	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-
1069	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

1070	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	-
1071	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	-
1072	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	-
1073	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	-
1074	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	-
1075	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	55.000.000,00	48.375.570,94	6.624.429,06
1076	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	54.000.000,00	54.000.000,00	-
1077	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU)	273.600.000,00	263.600.000,00	10.000.000,00
1078	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	27.540.000,00	27.540.000,00	-
1079	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	180.660.000,00	180.660.000,00	-
1080	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-
1081	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-
1082	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Komunikasi dan Informatika	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU)	100.000.000,00	100.000.000,00	-
1083	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Komunikasi dan Informatika	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU)	115.000.000,00	112.499.952,00	2.500.048,00
1084	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Komunikasi dan Informatika	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1085	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Komunikasi dan Informatika	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1086	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Komunikasi dan Informatika	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.000.000.000,00	1.844.200.000,00	155.800.000,00

1087	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Komunikasi dan Informatika	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1088	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Komunikasi dan Informatika	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),Dana Alokasi Umum (DAU)	1.331.180.671,96	1.331.180.671,96	-
1089	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Komunikasi dan Informatika	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1090	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Komunikasi dan Informatika	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1091	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Komunikasi dan Informatika	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1092	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Komunikasi dan Informatika	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),Dana Alokasi Umum (DAU)	6.468.432,00	6.468.432,00	-
1093	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Komunikasi dan Informatika	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.099.568,00	1.099.568,00	-
1094	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Komunikasi dan Informatika	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1095	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Komunikasi dan Informatika	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	56.800.000,00	29.300.000,00	27.500.000,00
1096	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Komunikasi dan Informatika	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	120.000.000,00	111.684.538,62	8.315.461,38
1097	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Komunikasi dan Informatika	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	54.000.000,00	54.000.000,00	-
1098	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Komunikasi dan Informatika	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	36.000.000,00	36.000.000,00	-
1099	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Komunikasi dan Informatika	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU),Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	168.000.000,00	168.000.000,00	-
1100	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Komunikasi dan Informatika	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1101	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Komunikasi dan Informatika	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dana Bagi Hasil (DBH)	50.000.000,00	37.500.000,00	12.500.000,00
1102	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Komunikasi dan Informatika	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1103	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Penanaman Modal	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-

1104	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Penanaman Modal	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1105	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Penanaman Modal	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dana Bagi Hasil (DBH),Dana Alokasi Umum (DAU)	25.000.000,00	19.686.300,00	5.313.700,00
1106	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Penanaman Modal	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dana Bagi Hasil (DBH),Dana Alokasi Umum (DAU)	5.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00
1107	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Penanaman Modal	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1108	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Penanaman Modal	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Dana Bagi Hasil (DBH),Dana Alokasi Umum (DAU)	20.619.640,00	20.619.640,00	-
1109	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Penanaman Modal	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1110	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Penanaman Modal	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Dana Bagi Hasil (DBH),Dana Alokasi Umum (DAU)	41.400.000,00	21.214.000,00	20.186.000,00
1111	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Penanaman Modal	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dana Bagi Hasil (DBH)	55.795.704,00	55.795.704,00	-
1112	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Penanaman Modal	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	-
1113	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Penanaman Modal	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dana Bagi Hasil (DBH)	46.415.000,00	17.873.580,45	28.541.419,55
1114	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Penanaman Modal	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1115	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Penanaman Modal	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),Dana Alokasi Umum (DAU)	2.033.067.407,94	2.033.067.407,94	-
1116	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Penanaman Modal	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1117	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Penanaman Modal	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-

1118	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Penanaman Modal	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1119	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Penanaman Modal	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1120	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Penanaman Modal	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	125.000.000,00	115.000.000,00	10.000.000,00
1121	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Penanaman Modal	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1122	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Penanaman Modal	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	25.000.000,00	13.920.000,00	11.080.000,00
1123	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Penanaman Modal	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU)	41.149.656,00	41.149.656,00	-
1124	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Penanaman Modal	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU)	60.720.000,00	50.720.000,00	10.000.000,00
1125	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Penanaman Modal	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	54.000.000,00	54.000.000,00	-
1126	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Penanaman Modal	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	39.000.000,00	39.000.000,00	-
1127	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Penanaman Modal	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	30.000.000,00	30.000.000,00	-
1128	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Penanaman Modal	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH)	5.100.000,00	5.100.000,00	-
1129	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	-
1130	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	100.000.000,00	92.000.000,00	8.000.000,00
1131	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	-
1132	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	-

						Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				
1133	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	-
1134	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	-
1135	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	-
1136	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-	-
1137	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	216.000.850,80	197.056.967,34	18.943.883,46
1138	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)	1.623.721.149,20	1.623.721.149,20	-
1139	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	-
1140	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	-
1141	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	-
1142	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU), DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	25.000.000,00	10.500.000,00	14.500.000,00
1143	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	-
1144	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	-
1145	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	-
1146	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	-
1147	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	-
1148	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	381.160.000,00	371.466.558,28	9.693.441,72

1149	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-	-
1150	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	50.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00
1151	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1152	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	-
1153	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)	1.895.127.042,04	1.895.127.042,04	-
1154	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-	-
1155	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-	-
1156	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-	-
1157	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-	-
1158	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-	-
1159	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			-	-
1160	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			-	-
1161	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	-
1162	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah			-	-
1163	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah			-	-
1164	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah			-	-
1165	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah			-	-
1166	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah			-	-

1167	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah			-	-
1168	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	-
1169	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-
1170	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-
1171	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	-
1172	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	125.000.000,00	120.000.000,00	5.000.000,00
1173	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	50.000.000,00	43.000.000,00	7.000.000,00
1174	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota			-	-
1175	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan			-	-
1176	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Kelautan dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan, DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	5.313.750.400,00	321.250.400,00	4.992.500.000,00
1177	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Kelautan dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1178	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Kelautan dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1179	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Kelautan dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU)	100.000.000,00	95.000.000,00	5.000.000,00
1180	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Kelautan dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1181	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Kelautan dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1182	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Kelautan dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-

						Usahnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
1183	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Kelautan dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Dana Bagi Hasil (DBH),Dana Alokasi Umum (DAU),DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	75.000.000,00	-	75.000.000,00
1184	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Kelautan dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Dana Alokasi Umum (DAU),DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	-
1185	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Kelautan dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Dana Bagi Hasil (DBH),Dana Alokasi Umum (DAU),DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	75.000.000,00	-	75.000.000,00
1186	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Kelautan dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1187	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Kelautan dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Dana Alokasi Umum (DAU),DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan,DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	2.557.300.000,00	-	2.557.300.000,00
1188	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Kelautan dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1189	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Kelautan dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1190	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Kelautan dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1191	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Kelautan dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1192	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Kelautan dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dana Alokasi Umum (DAU),DAK Fisik- Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan	600.000.000,00	-	600.000.000,00
1193	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Kelautan dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),Dana Bagi Hasil (DBH),Dana Alokasi Umum (DAU)	2.600.515.663,92	2.643.930.114,46	- 43.414.450,54
1194	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Kelautan dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1195	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Kelautan dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH),Dana Alokasi Umum (DAU)	1.500.000,00	1.500.000,00	-
1196	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Kelautan dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH),Dana Alokasi Umum (DAU)	41.944.590,00	26.931.880,00	15.012.710,00
1197	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Kelautan dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1198	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Kelautan dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH),Dana Alokasi Umum (DAU)	5.202.000,00	5.202.000,00	-

1199	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Kelautan dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH),Dana Alokasi Umum (DAU)	5.450.000,00	5.450.000,00	-
1200	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Kelautan dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH),Dana Alokasi Umum (DAU),DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	190.581.600,00	93.537.484,20	97.044.115,80
1201	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Kelautan dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH),DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	31.925.000,00	31.925.000,00	-
1202	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Kelautan dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH),DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	54.000.000,00	54.000.000,00	-
1203	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Kelautan dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	62.040.000,00	62.040.000,00	-
1204	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Kelautan dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH),Dana Alokasi Umum (DAU),DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan,Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	58.720.000,00	58.720.000,00	-
1205	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Kelautan dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH),Dana Alokasi Umum (DAU)	33.271.410,00	33.271.410,00	-
1206	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	149.800.000,00	104.526.337,47	45.273.662,53
1207	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	30.000.000,00	30.000.000,00	-
1208	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-
1209	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	299.199.962,00	279.199.962,00	20.000.000,00
1210	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-
1211	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-
1212	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-
1213	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),Dana Alokasi Umum (DAU)	2.038.773.567,24	2.103.895.243,12	- 65.121.675,88
1214	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-

1215	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1216	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1217	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1218	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1219	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1220	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1221	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1222	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1223	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1224	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1225	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1226	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1227	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1228	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1229	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	65.032.258,00	57.602.258,00	7.430.000,00
1230	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-

1231	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1232	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1233	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1234	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1235	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1236	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1237	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1238	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1239	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1240	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1241	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1242	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1243	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	169.916.400,40	131.916.400,40	38.000.000,00
1244	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)	29.800.000,00	26.300.000,00	3.500.000,00
1245	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-

1246	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1247	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1248	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Dana Alokasi Umum (DAU)	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1249	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1250	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),Dana Alokasi Umum (DAU),Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	2.476.824.540,00	2.476.824.540,00	-
1251	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1252	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1253	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1254	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.544.030,00	8.544.030,00	-
1255	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.228.488,00	1.228.488,00	-
1256	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.106.071,60	5.106.071,60	-
1257	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1258	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1259	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.129.800,00	1.129.800,00	-
1260	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	35.050.000,00	17.455.000,00	17.595.000,00
1261	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1262	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1263	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	26.561.412,00	26.561.412,00	-

1264	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1265	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	44.900.000,00	44.900.000,00	-
1266	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1267	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)	39.000.000,00	39.000.000,00	-
1268	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	35.800.000,00	35.800.000,00	-
1269	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1270	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1271	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1272	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	200.000.000,00	189.286.556,80	10.713.443,20
1273	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1274	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Dana Alokasi Umum (DAU)	74.860.200,00	70.885.200,00	3.975.000,00
1275	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Dana Bagi Hasil (DBH), Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	412.594.889,00	389.694.889,00	22.900.000,00
1276	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	-
1277	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	-
1278	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Prasarana Pertanian	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1279	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1280	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Dana Alokasi Umum (DAU), Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	137.523.900,00	112.523.900,00	25.000.000,00

1281	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1282	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1283	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1284	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.481.700,00	8.481.700,00	-
1285	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1286	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1287	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Dana Alokasi Umum (DAU)	45.500.000,00	22.750.000,00	22.750.000,00
1288	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Dana Alokasi Umum (DAU)	11.163.900,00	11.163.900,00	-
1289	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	6.940.774.942,00	401.800.000,00	6.538.974.942,00
1290	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)		6.991.973.700,00	- 6.991.973.700,00
1291	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.468.703,00	-	5.468.703,00
1292	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	20.735.951,00	5.468.703,00	15.267.248,00
1293	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU)		20.735.951,00	- 20.735.951,00
1294	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.133.462,00	-	5.133.462,00
1295	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		5.133.462,00	- 5.133.462,00
1296	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	9.295.964,86	-	9.295.964,86
1297	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH)	5.259.040,00	9.295.964,86	- 4.036.924,86
1298	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	85.650.000,00	5.259.040,00	80.390.960,00

1299	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)		32.825.000,00	- 32.825.000,00
1300	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1301	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1302	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	52.400.000,00	-	52.400.000,00
1303	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	54.000.000,00	42.400.000,00	11.600.000,00
1304	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	39.000.000,00	44.000.000,00	- 5.000.000,00
1305	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		29.000.000,00	- 29.000.000,00
1306	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	37.800.000,00	-	37.800.000,00
1307	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	4.880.000,00	37.800.000,00	- 32.920.000,00
1308	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	15.997.200,00	4.880.000,00	11.117.200,00
1309	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		13.410.720,76	- 13.410.720,76
1310	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			-	-
1311	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			-	-
1312	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			-	-
1313	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			-	-
1314	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan,		30.000.000,00	-	30.000.000,00

			dan Usaha Kecil Menengah		KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				
1315	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Dana Bagi Hasil (DBH)	30.000.000,00	-	30.000.000,00
1316	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Dana Bagi Hasil (DBH)	20.000.000,00	-	20.000.000,00
1317	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Dana Bagi Hasil (DBH)	10.000.000,00	20.000.000,00	- 10.000.000,00
1318	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.143.054.666,00	10.000.000,00	2.133.054.666,00
1319	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)	2.143.054.666,00	-	2.143.054.666,00
1320	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		3.999.420,00	-	3.999.420,00
1321	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.900.000,00	3.999.420,00	- 2.099.420,00
1322	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	500.000,00	1.500.000,00	- 1.000.000,00
1323	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	500.000,00	-	500.000,00
1324	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah		19.000.000,00	-	19.000.000,00
1325	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1326	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		70.714.560,00	-	70.714.560,00

1327	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	27.600.000,00	70.714.560,00	- 43.114.560,00
1328	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	39.840.000,00	27.600.000,00	12.240.000,00
1329	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	1.000.000,00	37.840.000,00	- 36.840.000,00
1330	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	150.000.000,00	1.000.000,00	149.000.000,00
1331	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	80.237.354,00	140.619.362,10	- 60.382.008,10
1332	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		75.237.354,00	- 75.237.354,00
1333	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya			-	-
1334	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			-	-
1335	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			-	-
1336	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		150.000.000,00	-	150.000.000,00
1337	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Dana Bagi Hasil (DBH)		130.350.000,00	- 130.350.000,00
1338	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-	-
1339	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		15.000.000,00	-	15.000.000,00
1340	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Dana Alokasi Umum (DAU)		9.999.999,99	- 9.999.999,99
1341	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			-	-

1342	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			-	-
1343	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		50.000.000,00	-	50.000.000,00
1344	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dana Bagi Hasil (DBH)	216.999.990,00	35.925.000,01	181.074.989,99
1345	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		216.999.990,00	- 216.999.990,00
1346	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	-
1347	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1348	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1349	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	504.000.000,00	-	504.000.000,00
1350	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU), Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	1.711.585.932,36	484.000.000,00	1.227.585.932,36
1351	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor		1.711.585.932,36	- 1.711.585.932,36
1352	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1353	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1354	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	52.698.800,00	-	52.698.800,00
1355	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	12.301.200,00	26.855.400,00	- 14.554.200,00
1356	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		12.301.200,00	- 12.301.200,00

1357	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1358	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1359	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	11.800.000,00	-	11.800.000,00
1360	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU),Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	11.800.000,00	-	11.800.000,00
1361	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	150.000.000,00	-	150.000.000,00
1362	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	50.000.000,00	143.432.929,03	93.432.929,03
1363	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Dana Alokasi Umum (DAU)	89.999.989,00	50.000.000,00	39.999.989,00
1364	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Administrasi Tata Pemerintahan	Dana Alokasi Umum (DAU)	97.000.000,00	50.500.789,00	46.499.211,00
1365	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Administrasi Tata Pemerintahan	Dana Alokasi Umum (DAU),Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	116.200.000,00	86.000.000,00	30.200.000,00
1366	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Administrasi Tata Pemerintahan	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.201.747.870,00	88.215.092,19	2.113.532.777,81
1367	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Dana Alokasi Umum (DAU),DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	1.345.331.670,00	2.143.955.747,18	798.624.077,18
1368	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Dana Alokasi Umum (DAU)	119.020.000,00	322.631.670,00	203.611.670,00
1369	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Dana Alokasi Umum (DAU)	114.500.000,00	109.010.000,00	5.490.000,00
1370	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Dana Alokasi Umum (DAU)	337.050.000,00	114.500.000,00	222.550.000,00
1371	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Dana Alokasi Umum (DAU)	153.270.915,53	237.050.000,00	83.779.084,47
1372	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Dana Alokasi Umum (DAU),Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	17.240.000,00	126.862.275,97	109.622.275,97
1373	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.760.000,00	17.240.000,00	9.480.000,00
1374	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	41.200.000,00	6.560.000,00	34.640.000,00

1375	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Dana Alokasi Umum (DAU)	78.000.000,00	34.200.000,00	43.800.000,00
1376	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Dana Alokasi Umum (DAU)	122.000.000,00	65.500.000,00	56.500.000,00
1377	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Dana Alokasi Umum (DAU),Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	35.000.000,00	119.730.920,00	- 84.730.920,00
1378	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Dana Alokasi Umum (DAU)		35.000.000,00	- 35.000.000,00
1379	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Dana Alokasi Umum (DAU)	369.922.995,20	-	369.922.995,20
1380	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Dana Alokasi Umum (DAU),Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	240.835.940,80	325.567.682,55	- 84.731.741,75
1381	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dana Alokasi Umum (DAU),Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	43.141.064,00	205.668.220,45	- 162.527.156,45
1382	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dana Alokasi Umum (DAU)	120.000.000,00	43.141.064,00	76.858.936,00
1383	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dana Alokasi Umum (DAU)	22.500.000,00	120.000.000,00	- 97.500.000,00
1384	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Dana Alokasi Umum (DAU)	22.500.000,00	7.500.000,00	15.000.000,00
1385	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.340.146.817,58	-	8.340.146.817,58
1386	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),Dana Alokasi Umum (DAU)	35.808.087,00	8.824.371.815,88	- 8.788.563.728,88
1387	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.296.675.326,05	35.808.087,00	2.260.867.239,05
1388	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU),Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	166.508.280,00	296.675.326,05	- 130.167.046,05
1389	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU),Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor		166.508.280,00	- 166.508.280,00
1390	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	20.899.800,00	-	20.899.800,00
1391	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	490.998.860,00	20.899.800,00	470.099.060,00
1392	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	344.950.000,00	490.998.860,00	- 146.048.860,00

1393	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	155.821.345,10	187.474.000,00	- 31.652.654,90
1394	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU),Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	578.400.000,00	155.821.345,10	422.578.654,90
1395	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	138.000.000,00	578.400.000,00	- 440.400.000,00
1396	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU),Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	1.000.200.000,00	138.000.000,00	862.200.000,00
1397	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	376.007.919,78	954.305.932,91	- 578.298.013,13
1398	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU),Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	27.020.000,00	376.007.919,78	- 348.987.919,78
1399	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	250.000.000,00	27.020.000,00	222.980.000,00
1400	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	460.183.787,00	200.000.000,00	260.183.787,00
1401	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	100.000.000,00	460.183.787,00	- 360.183.787,00
1402	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	100.000.000,00	100.000.000,00	-
1403	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU),DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	1.329.110.047,00	100.000.000,00	1.229.110.047,00
1404	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	444.293.886,00	1.078.951.247,00	- 634.657.361,00
1405	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Fasilitasi Kerumah Tanggaan Sekretariat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	67.666.666,00	399.453.986,00	- 331.787.320,00
1406	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penataan Organisasi	Dana Alokasi Umum (DAU)	82.666.668,00	48.229.600,00	34.437.068,00
1407	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penataan Organisasi	Dana Alokasi Umum (DAU)	67.666.666,00	59.626.696,00	8.039.970,00
1408	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penataan Organisasi	Dana Alokasi Umum (DAU)	105.200.000,00	48.792.727,00	56.407.273,00
1409	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penataan Organisasi	Dana Alokasi Umum (DAU),Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor		98.766.106,67	- 98.766.106,67
1410	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penataan Organisasi	Dana Alokasi Umum (DAU)	235.105.689,96		- 235.105.689,96

1411	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Dana Alokasi Umum (DAU),Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	190.800.000,00	171.057.064,96	19.742.935,04
1412	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Dana Alokasi Umum (DAU)	267.568.710,00	190.800.000,00	76.768.710,00
1413	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Dana Alokasi Umum (DAU)	47.400.000,00	247.538.557,76	- 200.138.557,76
1414	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Dana Alokasi Umum (DAU)	40.000.000,00	47.400.000,00	- 7.400.000,00
1415	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Dana Alokasi Umum (DAU)	50.100.000,00	40.000.000,00	10.100.000,00
1416	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Dana Alokasi Umum (DAU)	50.100.000,00	50.100.000,00	-
1417	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Dana Alokasi Umum (DAU)	248.962.000,00	50.100.000,00	198.862.000,00
1418	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Dana Alokasi Umum (DAU)	50.100.000,00	222.712.000,00	- 172.612.000,00
1419	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Dana Alokasi Umum (DAU)	50.100.000,00	50.100.000,00	-
1420	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Dana Alokasi Umum (DAU)	50.900.000,00	50.100.000,00	800.000,00
1421	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Dana Alokasi Umum (DAU)	31.200.000,00	50.900.000,00	- 19.700.000,00
1422	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Dana Alokasi Umum (DAU)	31.200.000,00	31.200.000,00	-
1423	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Dana Alokasi Umum (DAU)	31.200.000,00	31.200.000,00	-
1424	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Dana Alokasi Umum (DAU)	58.400.000,00	31.200.000,00	27.200.000,00
1425	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.338.716.000,00	58.400.000,00	1.280.316.000,00
1426	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Peningkatan Kapasitas DPRD	Dana Alokasi Umum (DAU)	688.960.000,00	669.360.000,00	19.600.000,00
1427	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Peningkatan Kapasitas DPRD	Dana Alokasi Umum (DAU)	447.000.000,00	638.480.000,00	- 191.480.000,00
1428	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Peningkatan Kapasitas DPRD	Dana Alokasi Umum (DAU)	45.000.000,00	447.000.000,00	- 402.000.000,00

1429	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.200.000,00	22.500.000,00	- 17.300.000,00
1430	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.428.259.200,00	5.200.000,00	1.423.059.200,00
1431	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.000.940.000,00	1.288.259.200,00	3.712.680.800,00
1432	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Fasilitasi Tugas DPRD	Dana Alokasi Umum (DAU)	33.193.220,00	2.450.470.000,00	- 2.417.276.780,00
1433	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	38.193.220,00	18.183.220,00	20.010.000,00
1434	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.133.969.737,00	20.683.220,00	2.113.286.517,00
1435	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU),Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	41.420.000,00	2.133.969.737,00	- 2.092.549.737,00
1436	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	65.000.000,00	27.770.000,00	37.230.000,00
1437	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		65.000.000,00	- 65.000.000,00
1438	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	175.500.000,00	-	175.500.000,00
1439	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.785.562,00	87.750.000,00	- 79.964.438,00
1440	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	16.585.200,00	7.785.562,00	8.799.638,00
1441	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	91.157.306,41	16.585.200,00	74.572.106,41
1442	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	56.087.250,00	91.157.306,41	- 35.070.056,41
1443	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	55.743.000,00	56.087.250,00	- 344.250,00
1444	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	30.000.000,00	51.000.000,00	- 21.000.000,00
1445	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		30.000.000,00	- 30.000.000,00
1446	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	418.602.940,00	-	418.602.940,00

1447	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.265.430.000,00	418.602.940,00	846.827.060,00
1448	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	54.000.000,00	714.665.000,00	- 660.665.000,00
1449	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	121.768.980,00	54.000.000,00	67.768.980,00
1450	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	331.084.237,60	121.768.980,00	209.315.257,60
1451	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		331.084.237,60	- 331.084.237,60
1452	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	411.405.613,32	-	411.405.613,32
1453	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	487.279.382,40	411.405.613,32	75.873.769,08
1454	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.103.760.300,00	487.279.382,40	616.480.917,60
1455	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	644.167.600,00	1.078.760.300,00	- 434.592.700,00
1456	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	56.030.000,00	644.167.600,00	- 588.137.600,00
1457	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	426.948.876,27	56.030.000,00	370.918.876,27
1458	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	10.778.110.785,00	426.948.876,27	10.351.161.908,73
1459	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Dana Alokasi Umum (DAU)	306.750.000,00	10.677.877.884,93	- 10.371.127.884,93
1460	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Dana Alokasi Umum (DAU)	193.440.000,00	306.750.000,00	- 113.310.000,00
1461	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Dana Alokasi Umum (DAU)	244.960.000,00	177.970.000,00	66.990.000,00
1462	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Layanan Administrasi DPRD	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.163.103.590,00	194.480.000,00	968.623.590,00
1463	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Layanan Administrasi DPRD	Dana Alokasi Umum (DAU)	140.000.000,00	1.163.103.590,00	- 1.023.103.590,00
1464	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	140.000.000,00	89.950.000,00	50.050.000,00

1465	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	195.788.000,00	110.120.000,00	85.668.000,00
1466	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Dana Alokasi Umum (DAU)		165.788.000,00	- 165.788.000,00
1467	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1468	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	14.305.500,00	-	14.305.500,00
1469	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	29.602.800,00	14.305.500,00	15.297.300,00
1470	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	PERENCANAAN	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dana Alokasi Umum (DAU)		29.602.800,00	- 29.602.800,00
1471	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	PERENCANAAN	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dana Alokasi Umum (DAU)	18.352.800,00	-	18.352.800,00
1472	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	PERENCANAAN	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dana Alokasi Umum (DAU)		18.352.800,00	- 18.352.800,00
1473	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	PERENCANAAN	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dana Alokasi Umum (DAU)	33.690.000,00	-	33.690.000,00
1474	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	PERENCANAAN	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Dana Alokasi Umum (DAU)		33.690.000,00	- 33.690.000,00
1475	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	PERENCANAAN	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Dana Alokasi Umum (DAU)	153.850.180,00	-	153.850.180,00
1476	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	PERENCANAAN	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Dana Alokasi Umum (DAU),DBH Sawit		153.850.180,00	- 153.850.180,00
1477	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	PERENCANAAN	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Dana Alokasi Umum (DAU)	27.040.000,00	-	27.040.000,00
1478	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	PERENCANAAN	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Dana Alokasi Umum (DAU)		27.040.000,00	- 27.040.000,00
1479	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	PERENCANAAN	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Dana Alokasi Umum (DAU)	12.020.000,00	-	12.020.000,00
1480	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	PERENCANAAN	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Dana Alokasi Umum (DAU)		12.020.000,00	- 12.020.000,00
1481	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	PERENCANAAN	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-

1482	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	PERENCANAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.736.344.270,00	-	3.736.344.270,00
1483	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	PERENCANAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU),Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	48.442.000,00	3.736.344.270,00	- 3.687.902.270,00
1484	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	PERENCANAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.209.428,00	48.442.000,00	- 44.232.572,00
1485	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	PERENCANAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	62.486.724,00	4.209.428,00	58.277.296,00
1486	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	PERENCANAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	53.081.820,00	62.486.724,00	- 9.404.904,00
1487	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	PERENCANAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		32.681.820,00	- 32.681.820,00
1488	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	PERENCANAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	21.401.000,00	-	21.401.000,00
1489	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	PERENCANAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	593.329.000,00	21.401.000,00	571.928.000,00
1490	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	PERENCANAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	22.288.447,00	319.179.000,00	- 296.890.553,00
1491	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	PERENCANAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	85.435.200,00	22.288.447,00	63.146.753,00
1492	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	PERENCANAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		65.100.756,28	- 65.100.756,28
1493	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	PERENCANAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1494	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	PERENCANAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.900.000,00	-	4.900.000,00
1495	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	PERENCANAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	35.770.000,00	4.900.000,00	30.870.000,00
1496	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	PERENCANAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.000.000,00	25.770.000,00	- 23.770.000,00
1497	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	PERENCANAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	11.940.000,00	2.000.000,00	9.940.000,00
1498	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	PERENCANAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	100.000.000,00	11.940.000,00	88.060.000,00
1499	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	PERENCANAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		45.290.000,00	- 45.290.000,00

[illegible]

1517	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	-
1518	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	-
1519	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	-
1520	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	29.867.750,00	-	29.867.750,00
1521	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	180.183.000,00	29.867.750,00	150.315.250,00
1522	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Keuangan	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	169.032.410,00	124.853.000,00	44.179.410,00
1523	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Keuangan	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	95.797.500,00	123.932.410,00	- 28.134.910,00
1524	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Keuangan	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	437.302.834,00	95.797.500,00	341.505.334,00
1525	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Keuangan	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	626.877.831,30	328.962.834,00	297.914.997,30
1526	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Keuangan	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	189.575.745,60	580.497.831,30	- 390.922.085,70
1527	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Keuangan	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	58.940.000,00	189.575.745,60	- 130.635.745,60
1528	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Keuangan	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	142.022.169.437,15	-	142.022.169.437,15
1529	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Keuangan	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Desa	2.000.000.000,00	141.972.169.437,15	- 139.972.169.437,15
1530	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Keuangan	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.007.291.343,10	754.485.646,13	1.252.805.696,97
1531	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Keuangan	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	372.575.350,00	2.007.291.343,10	- 1.634.715.993,10
1532	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Keuangan	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	493.249.060,00	349.365.350,00	143.883.710,00
1533	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Keuangan	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	409.325.032,10	281.008.560,00	128.316.472,10
1534	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Keuangan	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	79.800.000,00	339.402.532,10	- 259.602.532,10

1535	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Keuangan	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	69.260.000,00	54.900.000,00	14.360.000,00
1536	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Keuangan	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	88.132.500,00	32.870.500,00	55.262.000,00
1537	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Keuangan	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.206.151.878,00	45.826.250,00	5.160.325.628,00
1538	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Keuangan	KEUANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	188.000.000,00	6.496.812.615,89	- 6.308.812.615,89
1539	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Keuangan	KEUANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	35.245.644,63	188.000.000,00	- 152.754.355,37
1540	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Keuangan	KEUANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	105.424.725,31	35.245.644,63	70.179.080,68
1541	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Keuangan	KEUANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	36.975.000,00	105.424.725,31	- 68.449.725,31
1542	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Keuangan	KEUANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	36.975.000,00	- 36.975.000,00
1543	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Keuangan	KEUANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	30.663.550,00	-	30.663.550,00
1544	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Keuangan	KEUANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	129.550.340,00	30.663.550,00	98.886.790,00
1545	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Keuangan	KEUANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	391.850.000,00	86.337.845,00	305.512.155,00
1546	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Keuangan	KEUANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.158.990.730,00	197.710.400,00	961.280.330,00
1547	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Keuangan	KEUANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	446.200.000,00	1.128.301.395,55	- 682.101.395,55
1548	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Keuangan	KEUANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	54.000.000,00	446.200.000,00	- 392.200.000,00
1549	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Keuangan	KEUANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	303.600.000,00	54.000.000,00	249.600.000,00
1550	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Keuangan	KEUANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	84.456.000,00	303.600.000,00	- 219.144.000,00
1551	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Keuangan	KEUANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	57.979.000,00	84.456.000,00	- 26.477.000,00
1552	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Keuangan	KEUANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	57.979.000,00	- 57.979.000,00

1553	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Keuangan	KEUANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1554	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1555	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	16.522.500,00	-	16.522.500,00
1556	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	10.522.500,00	-	10.522.500,00
1557	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	10.700.000,00	-	10.700.000,00
1558	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.000.000,00	10.700.000,00	7.700.000,00
1559	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Mutasi dan Promosi ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.000.000,00	-	6.000.000,00
1560	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Mutasi dan Promosi ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	300.000.000,00	-	300.000.000,00
1561	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengembangan Kompetensi ASN	Dana Bagi Hasil (DBH)	54.930.480,00	-	54.930.480,00
1562	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengembangan Kompetensi ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1563	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengembangan Kompetensi ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1564	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.000.000,00	-	4.000.000,00
1565	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.000.000,00	-	4.000.000,00
1566	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.070.968.427,96	-	2.070.968.427,96
1567	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	KEPEGAWAIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU),Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	2.124.771.205,52	-	2.124.771.205,52
1568	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	KEPEGAWAIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.814.400,00	-	4.814.400,00
1569	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	KEPEGAWAIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.814.400,00	-	4.814.400,00
1570	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	KEPEGAWAIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.550.000,00	-	2.550.000,00

1571	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	KEPEGAWAIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	97.360.160,04	2.550.000,00	94.810.160,04
1572	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	KEPEGAWAIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH)		55.824.840,04	- 55.824.840,04
1573	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	KEPEGAWAIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	82.000.000,00	-	82.000.000,00
1574	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	KEPEGAWAIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	72.000.000,00	76.288.157,22	- 4.288.157,22
1575	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	KEPEGAWAIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		72.000.000,00	- 72.000.000,00
1576	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	KEPEGAWAIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	39.000.000,00	-	39.000.000,00
1577	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	KEPEGAWAIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	33.000.012,00	39.000.000,00	- 5.999.988,00
1578	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	KEPEGAWAIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU),Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor		33.000.012,00	- 33.000.012,00
1579	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	KEPEGAWAIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.530.000,00	-	5.530.000,00
1580	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	KEPEGAWAIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH)	150.000.000,00	5.530.000,00	144.470.000,00
1581	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	KEPEGAWAIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		140.000.000,00	- 140.000.000,00
1582	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pengembangan Kompetensi Teknis	Dana Alokasi Umum (DAU)	37.522.500,00	-	37.522.500,00
1583	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Dana Bagi Hasil (DBH)	246.450.000,00	37.522.500,00	208.927.500,00
1584	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	Inspektorat	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),Dana Alokasi Umum (DAU)	588.000.000,00	246.450.000,00	341.550.000,00
1585	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	Inspektorat	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	35.850.000,00	414.750.000,00	- 378.900.000,00
1586	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	Inspektorat	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	15.000.000,00	20.550.000,00	- 5.550.000,00
1587	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	Inspektorat	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	271.950.000,00	15.000.000,00	256.950.000,00
1588	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	Inspektorat	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),Pendapatan Bagi Hasil	50.400.000,00	147.000.000,00	- 96.600.000,00

							Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara			
1589	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	Inspektorat	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),Dana Alokasi Umum (DAU)	522.000.000,00	50.400.000,00	471.600.000,00
1590	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	Inspektorat	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan	105.600.000,00	180.000.000,00	- 74.400.000,00
1591	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	Inspektorat	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	208.775.250,00	84.000.000,00	124.775.250,00
1592	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	Inspektorat	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	692.249.927,00	182.550.000,00	509.699.927,00
1593	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	Inspektorat	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),Dana Alokasi Umum (DAU)	534.000.000,00	431.464.058,36	102.535.941,64
1594	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	Inspektorat	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	12.600.000,00	50.000.000,00	- 37.400.000,00
1595	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	Inspektorat	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Pendampingan dan Asistensi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	13.500.000,00	12.600.000,00	900.000,00
1596	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	Inspektorat	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Pendampingan dan Asistensi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	30.000.000,00	13.500.000,00	16.500.000,00
1597	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	Inspektorat	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Pendampingan dan Asistensi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	216.900.000,00	30.000.000,00	186.900.000,00
1598	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	Inspektorat	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Pendampingan dan Asistensi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	37.500.000,00	200.900.000,00	- 163.400.000,00
1599	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	Inspektorat	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		28.500.000,00	- 28.500.000,00
1600	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	Inspektorat	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1601	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	Inspektorat	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.523.229.690,00	-	4.523.229.690,00
1602	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	Inspektorat	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),Dana Alokasi Umum (DAU)		4.523.229.690,00	- 4.523.229.690,00
1603	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	Inspektorat	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1604	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	Inspektorat	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	64.283.255,00	-	64.283.255,00
1605	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	Inspektorat	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),Dana Alokasi Umum (DAU)	1.126.114.790,00	64.283.255,00	1.061.831.535,00

1606	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	Inspektorat	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara,Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan	687.598.225,00	812.448.967,00	- 124.850.742,00
1607	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	Inspektorat	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),Dana Alokasi Umum (DAU),Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	4.438.368,00	667.598.225,00	- 663.159.857,00
1608	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	Inspektorat	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	13.892.502,00	4.438.368,00	9.454.134,00
1609	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	Inspektorat	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU),Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan	12.330.000,00	11.892.502,00	437.498,00
1610	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	Inspektorat	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU),Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	723.000.000,00	12.330.000,00	710.670.000,00
1611	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	Inspektorat	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU),Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	1.649.995.700,00	210.900.000,00	1.439.095.700,00
1612	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	Inspektorat	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU),Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	24.480.000,00	191.136.700,00	- 166.656.700,00
1613	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	Inspektorat	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.480.000,00	20.480.000,00	- 16.000.000,00
1614	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	Inspektorat	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	125.760.000,00	4.480.000,00	121.280.000,00
1615	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	Inspektorat	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),Dana Alokasi Umum (DAU),Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	38.100.000,00	125.760.000,00	- 87.660.000,00
1616	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	Inspektorat	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	25.245.186,00	38.100.000,00	- 12.854.814,00
1617	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	Inspektorat	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	19.500.000,00	25.245.186,00	- 5.745.186,00
1618	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	Inspektorat	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		19.500.000,00	- 19.500.000,00
1619	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Anggrek	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)			- -
1620	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Anggrek	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)			- -

1621	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Anggrek	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1622	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Anggrek	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.350.000,00	-	6.350.000,00
1623	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Anggrek	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		4.400.000,00	- 4.400.000,00
1624	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Anggrek	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1625	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Anggrek	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1626	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Anggrek	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1627	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Anggrek	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1628	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Anggrek	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.875.000,00	-	4.875.000,00
1629	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Anggrek	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.500.000,00	4.875.000,00	2.625.000,00
1630	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Anggrek	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		3.750.000,00	- 3.750.000,00
1631	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Anggrek	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	915.318.568,00	-	915.318.568,00
1632	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Anggrek	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	5.100.000,00	915.318.568,00	- 910.218.568,00
1633	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Anggrek	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		3.300.000,00	- 3.300.000,00
1634	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Anggrek	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	22.500.000,00	-	22.500.000,00
1635	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Anggrek	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		20.500.000,00	- 20.500.000,00
1636	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Anggrek	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	9.426.330,00	-	9.426.330,00

1637	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Anggrek	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.668.940,00	9.426.330,00	- 5.757.390,00
1638	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Anggrek	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		2.652.000,00	- 2.652.000,00
1639	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Anggrek	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	45.000.000,00	-	45.000.000,00
1640	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Anggrek	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	37.140.000,00	30.779.042,93	6.360.957,07
1641	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Anggrek	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		19.770.000,00	- 19.770.000,00
1642	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Anggrek	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1643	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Anggrek	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	15.555.000,00	-	15.555.000,00
1644	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Anggrek	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		15.555.000,00	- 15.555.000,00
1645	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Anggrek	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1646	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Anggrek	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1647	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Anggrek	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	17.600.000,00	-	17.600.000,00
1648	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Anggrek	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	54.000.000,00	17.600.000,00	36.400.000,00
1649	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Anggrek	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU),Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	49.200.000,00	54.000.000,00	- 4.800.000,00
1650	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Anggrek	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	18.000.000,00	49.200.000,00	- 31.200.000,00
1651	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Anggrek	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU),Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor		17.000.000,00	- 17.000.000,00
1652	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Anggrek	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.088.160,00	-	4.088.160,00
1653	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Anggrek	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		4.088.160,00	- 4.088.160,00
1654	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Monano	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-

1655	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Monano	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1656	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Monano	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.925.000,00	-	2.925.000,00
1657	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Monano	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		2.925.000,00	- 2.925.000,00
1658	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Monano	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1659	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Monano	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1660	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Monano	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1661	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Monano	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1662	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Monano	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1663	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Monano	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1664	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Monano	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.000.000,00	-	6.000.000,00
1665	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Monano	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		3.000.000,00	- 3.000.000,00
1666	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Monano	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.048.033.272,00	-	1.048.033.272,00
1667	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Monano	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	6.000.000,00	1.048.033.272,00	- 1.042.033.272,00
1668	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Monano	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		3.000.000,00	- 3.000.000,00
1669	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Monano	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	21.000.000,00	-	21.000.000,00

1670	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Monano	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		21.000.000,00	- 21.000.000,00
1671	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Monano	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	10.977.750,00	-	10.977.750,00
1672	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Monano	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.736.660,00	10.977.750,00	- 8.241.090,00
1673	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Monano	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		2.579.998,20	- 2.579.998,20
1674	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Monano	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	42.500.000,00	-	42.500.000,00
1675	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Monano	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	38.250.000,00	34.088.952,90	4.161.047,10
1676	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Monano	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		22.020.000,00	- 22.020.000,00
1677	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Monano	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1678	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Monano	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	30.811.152,00	-	30.811.152,00
1679	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Monano	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		30.811.152,00	- 30.811.152,00
1680	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Monano	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1681	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Monano	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1682	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Monano	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	12.999.000,00	-	12.999.000,00
1683	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Monano	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	54.000.000,00	12.999.000,00	41.001.000,00
1684	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Monano	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	37.800.000,00	50.000.000,00	- 12.200.000,00
1685	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Monano	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	18.000.000,00	31.800.000,00	- 13.800.000,00
1686	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Monano	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor		18.000.000,00	- 18.000.000,00
1687	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Monano	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-

1688	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Monano	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	11.700.000,00	-	11.700.000,00
1689	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sumalata	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.800.000,00	-	7.800.000,00
1690	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sumalata	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-
1691	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sumalata	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-
1692	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sumalata	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	10.725.000,00	-	10.725.000,00
1693	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sumalata	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	9.360.000,00	-	9.360.000,00
1694	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sumalata	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-
1695	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sumalata	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-
1696	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sumalata	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-
1697	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sumalata	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.900.000,00	-	3.900.000,00
1698	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sumalata	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.875.000,00	2.925.000,00	1.950.000,00
1699	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sumalata	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.000.000,00	4.875.000,00	- 1.875.000,00
1700	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sumalata	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.000.000,00	-	3.000.000,00
1701	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sumalata	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.125.140.680,00	-	1.125.140.680,00
1702	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sumalata	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)	3.000.000,00	1.125.140.680,00	- 1.122.140.680,00

1703	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sumalata	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		1.500.000,00	- 1.500.000,00
1704	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sumalata	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	28.200.000,00	-	28.200.000,00
1705	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sumalata	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	28.200.000,00	-	28.200.000,00
1706	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sumalata	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	9.583.920,00	-	9.583.920,00
1707	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sumalata	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.337.950,00	9.583.920,00	- 6.245.970,00
1708	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sumalata	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		2.696.880,00	- 2.696.880,00
1709	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sumalata	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	34.250.000,00	-	34.250.000,00
1710	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sumalata	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	10.530.000,00	24.665.000,00	- 14.135.000,00
1711	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sumalata	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		3.720.000,00	- 3.720.000,00
1712	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sumalata	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1713	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sumalata	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	19.176.000,00	-	19.176.000,00
1714	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sumalata	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		19.176.000,00	- 19.176.000,00
1715	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sumalata	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.160.000,00	-	8.160.000,00
1716	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sumalata	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		8.160.000,00	- 8.160.000,00
1717	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sumalata	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	25.250.000,00	-	25.250.000,00
1718	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sumalata	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	54.000.000,00	21.250.000,00	32.750.000,00
1719	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sumalata	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	37.800.000,00	49.192.688,49	- 11.392.688,49
1720	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sumalata	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	18.000.450,00	37.800.000,00	- 19.799.550,00

1721	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sumalata	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor		18.000.450,00	- 18.000.450,00
1722	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sumalata	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.825.000,00	-	3.825.000,00
1723	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sumalata	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		3.825.000,00	- 3.825.000,00
1724	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sumalata Timur	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1725	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sumalata Timur	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1726	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sumalata Timur	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1727	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sumalata Timur	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1728	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sumalata Timur	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1729	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sumalata Timur	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1730	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sumalata Timur	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1731	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sumalata Timur	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1732	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sumalata Timur	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1733	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sumalata Timur	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.070.000,00	-	5.070.000,00
1734	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sumalata Timur	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.500.000,00	5.070.000,00	2.430.000,00
1735	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sumalata Timur	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		6.000.000,00	- 6.000.000,00

1736	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sumalata Timur	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.127.325.056,00	-	1.127.325.056,00
1737	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sumalata Timur	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),Dana Alokasi Umum (DAU)	4.500.000,00	1.127.325.056,00	- 1.122.825.056,00
1738	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sumalata Timur	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		3.000.000,00	- 3.000.000,00
1739	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sumalata Timur	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	19.500.000,00	-	19.500.000,00
1740	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sumalata Timur	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		16.500.000,00	- 16.500.000,00
1741	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sumalata Timur	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	20.294.940,00	-	20.294.940,00
1742	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sumalata Timur	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.100.000,00	20.294.940,00	- 15.194.940,00
1743	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sumalata Timur	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		2.550.000,00	- 2.550.000,00
1744	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sumalata Timur	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	43.500.000,00	-	43.500.000,00
1745	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sumalata Timur	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	41.230.000,00	27.902.260,81	13.327.739,19
1746	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sumalata Timur	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		22.470.000,00	- 22.470.000,00
1747	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sumalata Timur	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1748	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sumalata Timur	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	21.251.088,00	-	21.251.088,00
1749	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sumalata Timur	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		21.251.088,00	- 21.251.088,00
1750	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sumalata Timur	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1751	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sumalata Timur	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1752	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sumalata Timur	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	12.750.000,00	-	12.750.000,00
1753	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sumalata Timur	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	69.000.000,00	12.750.000,00	56.250.000,00

1754	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sumalata Timur	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU),Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	37.800.000,00	64.000.000,00	- 26.200.000,00
1755	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sumalata Timur	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	18.000.450,00	37.800.000,00	- 19.799.550,00
1756	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sumalata Timur	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor		18.000.450,00	- 18.000.450,00
1757	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sumalata Timur	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1758	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sumalata Timur	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	10.500.000,00	-	10.500.000,00
1759	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kwandang	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)		10.500.000,00	- 10.500.000,00
1760	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kwandang	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1761	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kwandang	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1762	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kwandang	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.100.000,00	-	4.100.000,00
1763	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kwandang	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		4.100.000,00	- 4.100.000,00
1764	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kwandang	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1765	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kwandang	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1766	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kwandang	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1767	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kwandang	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1768	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kwandang	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.500.000,00	-	4.500.000,00
1769	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kwandang	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	Dana Alokasi Umum (DAU)		4.500.000,00	- 4.500.000,00

						Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
1770	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kwandang	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1771	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kwandang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1772	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kwandang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.447.642.394,64	-	1.447.642.394,64
1773	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kwandang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)	1.447.642.394,64	-	1.447.642.394,64
1774	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kwandang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1775	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kwandang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	10.800.000,00	-	10.800.000,00
1776	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kwandang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	10.800.000,00	-	10.800.000,00
1777	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kwandang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	13.481.850,00	-	13.481.850,00
1778	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kwandang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.051.730,00	13.481.850,00	- 11.430.120,00
1779	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kwandang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		1.843.650,00	- 1.843.650,00
1780	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kwandang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	43.200.000,00	-	43.200.000,00
1781	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kwandang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	42.800.000,00	32.425.000,00	10.375.000,00
1782	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kwandang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		24.200.000,00	- 24.200.000,00
1783	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kwandang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1784	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kwandang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	22.766.400,00	-	22.766.400,00
1785	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kwandang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		22.766.400,00	- 22.766.400,00
1786	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kwandang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-

1787	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kwandang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1788	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kwandang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.181.343,10	-	6.181.343,10
1789	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kwandang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	54.000.000,00	6.181.343,10	47.818.656,90
1790	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kwandang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	37.800.000,00	47.236.917,69	- 9.436.917,69
1791	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kwandang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	17.999.999,87	32.800.000,00	- 14.800.000,13
1792	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kwandang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor		17.999.999,87	- 17.999.999,87
1793	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kwandang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1794	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kwandang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1795	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Tomilito	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	-
1796	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Tomilito	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	-
1797	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Tomilito	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	-
1798	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Tomilito	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.457.000,00	-	2.457.000,00
1799	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Tomilito	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		2.457.000,00	- 2.457.000,00
1800	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Tomilito	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	-
1801	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Tomilito	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	-
1802	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Tomilito	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	-
1803	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Tomilito	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	-

						Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
1804	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Tomilito	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.850.000,00	-	5.850.000,00
1805	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Tomilito	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.500.000,00	5.850.000,00	1.650.000,00
1806	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Tomilito	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		1.800.000,00	- 1.800.000,00
1807	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Tomilito	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.215.638.793,00	-	1.215.638.793,00
1808	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Tomilito	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)	7.500.000,00	1.215.638.793,00	- 1.208.138.793,00
1809	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Tomilito	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		5.550.000,00	- 5.550.000,00
1810	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Tomilito	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25.800.000,00	-	25.800.000,00
1811	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Tomilito	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		25.800.000,00	- 25.800.000,00
1812	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Tomilito	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.410.920,00	-	8.410.920,00
1813	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Tomilito	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.269.230,00	8.410.920,00	- 5.141.690,00
1814	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Tomilito	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		2.222.325,51	- 2.222.325,51
1815	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Tomilito	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	56.125.000,00	-	56.125.000,00
1816	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Tomilito	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	22.680.000,00	40.285.000,00	- 17.605.000,00
1817	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Tomilito	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		11.480.000,00	- 11.480.000,00
1818	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Tomilito	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12.443.100,00	-	12.443.100,00
1819	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Tomilito	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	10.965.000,00	12.443.100,00	- 1.478.100,00

1820	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Tomilito	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		10.965.000,00	- 10.965.000,00
1821	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Tomilito	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	-
1822	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Tomilito	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	16.050.000,00	-	16.050.000,00
1823	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Tomilito	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	69.000.000,00	16.050.000,00	52.950.000,00
1824	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Tomilito	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU),Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	36.000.000,00	63.279.173,83	- 27.279.173,83
1825	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Tomilito	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	18.000.000,00	32.000.000,00	- 14.000.000,00
1826	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Tomilito	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor		18.000.000,00	- 18.000.000,00
1827	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Tomilito	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	-
1828	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Tomilito	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	-
1829	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Gentuma Raya	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1830	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Gentuma Raya	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1831	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Gentuma Raya	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1832	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Gentuma Raya	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1833	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Gentuma Raya	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1834	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Gentuma Raya	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1835	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Gentuma Raya	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1836	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Gentuma Raya	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-

1837	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Gentuma Raya	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1838	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Gentuma Raya	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.875.000,00	-	6.875.000,00
1839	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Gentuma Raya	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	9.000.000,00	6.875.000,00	2.125.000,00
1840	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Gentuma Raya	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		4.500.000,00	- 4.500.000,00
1841	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Gentuma Raya	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.230.802.866,00	-	1.230.802.866,00
1842	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Gentuma Raya	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)	8.250.000,00	1.230.802.866,00	- 1.222.552.866,00
1843	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Gentuma Raya	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		4.125.000,00	- 4.125.000,00
1844	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Gentuma Raya	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	25.200.000,00	-	25.200.000,00
1845	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Gentuma Raya	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		25.200.000,00	- 25.200.000,00
1846	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Gentuma Raya	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	10.344.840,00	-	10.344.840,00
1847	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Gentuma Raya	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.998.000,00	10.344.840,00	- 5.346.840,00
1848	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Gentuma Raya	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.577.140,00	3.499.620,00	77.520,00
1849	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Gentuma Raya	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	38.575.000,00	3.577.140,00	34.997.860,00
1850	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Gentuma Raya	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	32.780.000,00	30.691.590,04	2.088.409,96
1851	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Gentuma Raya	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		18.475.000,00	- 18.475.000,00
1852	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Gentuma Raya	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.057.560,00	-	4.057.560,00
1853	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Gentuma Raya	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	12.342.000,00	4.057.560,00	8.284.440,00

1854	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Gentuma Raya	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		12.342.000,00	- 12.342.000,00
1855	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Gentuma Raya	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1856	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Gentuma Raya	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1857	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Gentuma Raya	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	18.999.000,00	-	18.999.000,00
1858	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Gentuma Raya	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	54.000.000,00	18.999.000,00	35.001.000,00
1859	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Gentuma Raya	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	36.000.000,00	49.000.000,00	- 13.000.000,00
1860	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Gentuma Raya	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	18.000.000,00	31.000.000,00	- 13.000.000,00
1861	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Gentuma Raya	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		18.000.000,00	- 18.000.000,00
1862	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Gentuma Raya	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1863	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Gentuma Raya	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1864	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Atinggola	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1865	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Atinggola	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1866	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Atinggola	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Diliimpahkan kepada Camat	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1867	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Atinggola	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1868	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Atinggola	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1869	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Atinggola	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1870	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Atinggola	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-

1871	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Atinggola	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1872	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Atinggola	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1873	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Atinggola	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.750.000,00	-	6.750.000,00
1874	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Atinggola	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.000.000,00	6.750.000,00	- 750.000,00
1875	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Atinggola	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		3.000.000,00	- 3.000.000,00
1876	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Atinggola	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.342.182.840,60	-	1.342.182.840,60
1877	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Atinggola	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)	5.100.000,00	1.342.182.840,60	- 1.337.082.840,60
1878	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Atinggola	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		2.550.000,00	- 2.550.000,00
1879	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Atinggola	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	25.200.000,00	-	25.200.000,00
1880	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Atinggola	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		25.200.000,00	- 25.200.000,00
1881	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Atinggola	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.860.230,00	-	8.860.230,00
1882	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Atinggola	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.672.220,00	8.860.230,00	- 3.188.010,00
1883	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Atinggola	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		4.569.600,00	- 4.569.600,00
1884	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Atinggola	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	44.210.000,00	-	44.210.000,00
1885	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Atinggola	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	43.660.000,00	35.610.000,00	8.050.000,00
1886	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Atinggola	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		28.530.000,00	- 28.530.000,00
1887	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Atinggola	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-

1888	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Atinggola	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	14.752.056,00	-	14.752.056,00
1889	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Atinggola	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	14.752.056,00	-	14.752.056,00
1890	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Atinggola	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-
1891	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Atinggola	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-
1892	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Atinggola	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	23.500.000,00	-	23.500.000,00
1893	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Atinggola	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	54.000.000,00	23.500.000,00	30.500.000,00
1894	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Atinggola	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	36.000.000,00	48.003.582,71	- 12.003.582,71
1895	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Atinggola	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	18.000.000,00	36.000.000,00	- 18.000.000,00
1896	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Atinggola	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	18.000.000,00	-	18.000.000,00
1897	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Atinggola	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.295.000,00	-	2.295.000,00
1898	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Atinggola	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.295.000,00	-	2.295.000,00
1899	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Biau	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-
1900	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Biau	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-
1901	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Biau	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-
1902	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Biau	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-
1903	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Biau	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-
1904	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Biau	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-

1905	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Biau	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1906	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Biau	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1907	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Biau	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1908	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Biau	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.290.000,00	-	4.290.000,00
1909	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Biau	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		4.290.000,00	- 4.290.000,00
1910	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Biau	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1911	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Biau	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1912	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Biau	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.176.830.000,00	-	1.176.830.000,00
1913	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Biau	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)		1.176.830.000,00	- 1.176.830.000,00
1914	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Biau	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.750.000,00	-	3.750.000,00
1915	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Biau	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	24.600.000,00	3.750.000,00	20.850.000,00
1916	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Biau	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		24.600.000,00	- 24.600.000,00
1917	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Biau	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.537.290,00	-	7.537.290,00
1918	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Biau	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.558.686,00	7.537.290,00	- 2.978.604,00
1919	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Biau	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		4.008.345,00	- 4.008.345,00
1920	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Biau	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	40.050.000,00	-	40.050.000,00

1921	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Biau	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	45.740.000,00	30.040.000,00	15.700.000,00
1922	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Biau	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		21.628.222,82	- 21.628.222,82
1923	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Biau	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1924	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Biau	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	16.575.000,00	-	16.575.000,00
1925	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Biau	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		16.575.000,00	- 16.575.000,00
1926	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Biau	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1927	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Biau	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1928	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Biau	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	18.900.000,00	-	18.900.000,00
1929	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Biau	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	69.000.000,00	18.900.000,00	50.100.000,00
1930	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Biau	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU)	39.000.000,00	59.000.000,00	- 20.000.000,00
1931	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Biau	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	17.999.999,99	39.000.000,00	- 21.000.000,01
1932	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Biau	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor		17.999.999,99	- 17.999.999,99
1933	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Biau	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.163.020,00	-	3.163.020,00
1934	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Biau	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		3.163.020,00	- 3.163.020,00
1935	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Tolinggula	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1936	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Tolinggula	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1937	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Tolinggula	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-

1938	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Tolinggula	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1939	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Tolinggula	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1940	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Tolinggula	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1941	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Tolinggula	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1942	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Tolinggula	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1943	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Tolinggula	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1944	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Tolinggula	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.680.000,00	-	4.680.000,00
1945	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Tolinggula	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		4.680.000,00	- 4.680.000,00
1946	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Tolinggula	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1947	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Tolinggula	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1948	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Tolinggula	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.282.117.677,00	-	1.282.117.677,00
1949	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Tolinggula	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)	3.600.000,00	1.282.117.677,00	- 1.278.517.677,00
1950	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Tolinggula	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	11.330.000,00	1.800.000,00	9.530.000,00
1951	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Tolinggula	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	25.200.000,00	5.665.000,00	19.535.000,00
1952	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Tolinggula	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.129.510,00	20.200.000,00	- 19.070.490,00
1953	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Tolinggula	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	12.850.980,00	1.129.510,00	11.721.470,00

1954	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Tolinggula	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.437.510,00	12.850.980,00	- 8.413.470,00
1955	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Tolinggula	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		3.672.510,00	- 3.672.510,00
1956	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Tolinggula	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	39.250.000,00	-	39.250.000,00
1957	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Tolinggula	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	28.850.000,00	33.750.000,00	- 4.900.000,00
1958	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Tolinggula	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		17.350.000,00	- 17.350.000,00
1959	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Tolinggula	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1960	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Tolinggula	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	29.172.000,00	-	29.172.000,00
1961	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Tolinggula	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		29.172.000,00	- 29.172.000,00
1962	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Tolinggula	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1963	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Tolinggula	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1964	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Tolinggula	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	23.500.000,00	-	23.500.000,00
1965	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Tolinggula	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	54.000.000,00	23.500.000,00	30.500.000,00
1966	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Tolinggula	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	36.000.000,00	48.666.012,00	- 12.666.012,00
1967	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Tolinggula	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	18.000.000,00	31.000.000,00	- 13.000.000,00
1968	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Tolinggula	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor		18.000.000,00	- 18.000.000,00
1969	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Tolinggula	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1970	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Tolinggula	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1971	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Ponelo Kepulauan	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-

1972	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Ponelo Kepulauan	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1973	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Ponelo Kepulauan	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1974	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Ponelo Kepulauan	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1975	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Ponelo Kepulauan	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1976	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Ponelo Kepulauan	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1977	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Ponelo Kepulauan	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			-	-
1978	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Ponelo Kepulauan	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1979	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Ponelo Kepulauan	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1980	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Ponelo Kepulauan	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1981	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Ponelo Kepulauan	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1982	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Ponelo Kepulauan	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.850.000,00	-	2.850.000,00
1983	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Ponelo Kepulauan	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.850.000,00	2.850.000,00	-
1984	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Ponelo Kepulauan	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	915.169.704,00	2.850.000,00	912.319.704,00
1985	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Ponelo Kepulauan	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU)		915.169.704,00	- 915.169.704,00
1986	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Ponelo Kepulauan	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-

1987	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Ponele Kepulauan	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	20.020.000,00	-	20.020.000,00
1988	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Ponele Kepulauan	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	20.020.000,00	-	20.020.000,00
1989	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Ponele Kepulauan	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah		13.457.370,00	-	13.457.370,00
1990	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Ponele Kepulauan	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	13.457.370,00	-	13.457.370,00
1991	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Ponele Kepulauan	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah			-	-
1992	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Ponele Kepulauan	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1993	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Ponele Kepulauan	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	42.610.000,00	-	42.610.000,00
1994	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Ponele Kepulauan	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	24.250.000,00	34.180.000,00	- 9.930.000,00
1995	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Ponele Kepulauan	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	11.495.000,00	-	11.495.000,00
1996	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Ponele Kepulauan	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
1997	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Ponele Kepulauan	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	27.894.000,00	-	27.894.000,00
1998	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Ponele Kepulauan	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	27.894.000,00	-	27.894.000,00
1999	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Ponele Kepulauan	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
2000	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Ponele Kepulauan	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	-
2001	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Ponele Kepulauan	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	9.999.000,00	-	9.999.000,00
2002	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Ponele Kepulauan	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	69.000.000,00	9.999.000,00	59.001.000,00
2003	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Ponele Kepulauan	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	36.000.000,00	63.337.974,79	- 27.337.974,79
2004	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Ponele Kepulauan	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	14.068.350,00	33.000.000,00	- 18.931.650,00

2005	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Ponele Kepulauan	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	17.998.920,00	14.068.350,00	3.930.570,00
2006	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Ponele Kepulauan	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor		17.998.920,00	- 17.998.920,00
2007	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Ponele Kepulauan	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
2008	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Ponele Kepulauan	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
2009	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
2010	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
2011	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	524.999.640,14	-	524.999.640,14
2012	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	718.867.825,00	524.999.640,14	193.868.184,86
2013	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Dana Alokasi Umum (DAU)		9.900.705.988,00	- 9.900.705.988,00
2014	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Dana Alokasi Umum (DAU)	24.896.000,00	-	24.896.000,00
2015	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum	Dana Alokasi Umum (DAU)	50.000.000,00	9.896.000,00	40.104.000,00

						Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				
2016	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Dana Alokasi Umum (DAU)	35.000.000,00	47.000.000,00	- 12.000.000,00
2017	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Dana Bagi Hasil (DBH)	35.000.000,00	10.000.000,00	25.000.000,00
2018	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	-
2019	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Dana Alokasi Umum (DAU)	69.550.000,00	-	69.550.000,00
2020	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Dana Alokasi Umum (DAU)		59.550.000,00	- 59.550.000,00
2021	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Dana Alokasi Umum (DAU)	337.260.000,00	-	337.260.000,00
2022	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.178.772.874,84	279.500.000,00	1.899.272.874,84
2023	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU)		2.178.772.874,83	- 2.178.772.874,83
2024	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	58.096.320,00	-	58.096.320,00
2025	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor		48.096.320,00	- 48.096.320,00
2026	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
2027	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	24.996.800,00	-	24.996.800,00
2028	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	29.220.000,00	10.050.400,00	19.169.600,00

2029	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	43.200.000,00	29.220.000,00	13.980.000,00
2030	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	18.000.000,00	43.200.000,00	- 25.200.000,00
2031	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor		18.000.000,00	- 18.000.000,00
2032	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
2033	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	150.000.000,00	140.448.548,27	9.551.451,73

803.200.034.655,69 702.085.479.144,20 101.114.555.511,49